



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI DENGAN
KEPALA BRINRI DAN DIRUT PT BIO FARMA (PERSERO)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	: 13 (Tigabelas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (lanjutan)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 24 Januari 2022
Waktu	: Pukul 16.40 WIB s.d. 20.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gd. Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
Acara	: 1. Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK; 2. Penjelasan Perkembangan Vaksin Merah Putih; 3. Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN; dan 4. Lain-lain.
Hadir	: 18 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-PG/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
5. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 3 orang Anggota dari 11 Anggota:
1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E..

2. Paramita Widya Kusuma, S.E.
3. Novri Ompusunggu, S.H., M.H

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

2 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Mukhtarudin
2. Dyah Roro Esti, W.P., B.A., M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. H. Subarna, S.E., M.Si.
2. Katherine A. Oendoen

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. H. Ali Ahmad
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Sartono, S.E., M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

- orang Anggota dari 5 Anggota:

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

- orang Anggota dari 1 Anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. (Kepala BRINRI)
2. Honesti Basyir (Dirut PT Bio Farma Persero)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pak Kepala bisa kita mulai? Baik, izin Pak Ketua.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Salam sehat untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPRRI,
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI,
Yang kami hormati Kepala BRINRI beserta jajarannya,
Yang kami hormati Direktur Utama PT Bio Farma Persero beserta jajarannya,
serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanallahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat secara protokol kesehatan, fisik dan virtual guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak/Ibu anggota Komisi VII DPRRI untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada hari ini, apalagi sejumlah anggota telah mengikuti rapat dengar pendapat dari berbagai agenda hari ini sejak pukul 10.00 WIB pagi hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPRRI pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2021-2022 pada hari ini Komisi VII DPRRI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Direktur Utama PT Bio Farma dalam rangka fungsi pengawasan dengan agenda sebagai berikut:

1. Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman & PP IPTEK;
2. Penjelasan Perkembangan Vaksin Merah Putih;
3. Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN; dan
4. Lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 23 orang dari 51 anggota Komisi VII, yang terdiri atas 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib Pasal 281 Ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu,

Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat dengar pendapat hari ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Kepala BRINRI dan Direktur Utama PT Bio Farma, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.40 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami mintakan persetujuan Bapak/Ibu anggota Komisi VII DPRRI bahwa rapat ini selesai dalam kurun waktu 1,5 jam dari rapat ini yang kita sudah mulai dan bisa diperpanjang, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Pada hari Senin, 17 Januari 2022 yang lalu telah diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BRINRI dan Dirut PT Bio Farma dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan menghadirkan mantan Direktur LBM Eijkman beserta jajaran deputinya yang lama. Dari kegiatan rapat tersebut telah dialami hal-hal yang perlu diperlukan terkait peleburan LBM Eijkman dan lembaga-lembaga lain ke dalam BRINRI.

Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan rapat yang terfokus pada proses peleburan lembaga-lembaga riset ke BRINRI dan produksi vaksin Merah Putih dengan Kepala BRINRI dan Dirut PT Bio Farma agar dapat diperoleh kesepakatan dan kesepakatan bersama terkait agenda tersebut.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Sebagai tindak lanjut pembentukan BRINRI diterbitkanlah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang kemudian BRIN meleburkan beberapa lembaga riset di Indonesia, seperti : BATAN, LAPAN, LIPI, BPPT dan lembaga riset lainnya termasuk yang sedang dibicarakan oleh publik saat ini yaitu Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman.

Peleburan lembaga-lembaga riset tersebut jika tidak kita kawal bersama dikhawatirkan berpotensi menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat riset yang sedang atau akan berjalan. Urusan peleburan lembaga sebaiknya tidak berbenturan dengan aturan administratif atau bahkan birokrasi peneliti atau *scienties* yang berujung pada tidak terekrutnya para peneliti atau *scienties* terbaik dari lembaga-lembaga tersebut.

Oleh karena itu, Komisi VII DPRRI meminta gambaran yang detail dan komprehensif dari proses peleburan atau integrasi tersebut agar tercipta tata kelola dan mekanisme yang baik yang diharapkan oleh semua pihak.

Kemudian menjadi pertanyaan bersama bagaimana produksi atau kelanjutan produksi vaksin Merah Putih, apakah akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga riset dan bagaimana pelaksanaannya di kemudian hari? Apakah proses peleburan berpotensi memperlambat pengembangan dan produksi vaksin Merah Putih yang telah kita ketahui sudah dirintis dari awal pandemi sejak tahun 2020 yang lalu.

Dalam hal ini Komisi VII DPRRI menginginkan penjelasan, baik dari Kepala BRIN dan juga Dirut Bio Farma terkait target pengembangan vaksin Merah Putih ke depannya. Dalam hal produksi vaksin BUMN, Komisi VII DPRRI juga ingin mendapatkan penjelasan yang detail dan komprehensif dari rencana diadakannya produksi vaksin BUMN ini. Sekali lagi Komisi VII DPRRI berharap adanya vaksin BUMN tidak menggeser prioritas produksi vaksin Merah Putih. Komisi VII DPRRI berharap kerjasama pengembangan vaksin Merah Putih antara LBM Eijkman dan Bio farma dan juga pengembangan vaksin Merah Putih dari lembaga lainnya harus mendapatkan konsentrasi dan perhatian yang menyeluruh dari semua pihak.

Ibu/Bapak yang kami hormati.

Selanjutnya untuk efektifnya waktu pembahasan, kami persilakan Kepala BRINRI disusul Direktur Utama PT Bio Farma untuk menyampaikan pemaparannya.

Kami persilakan.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sehat,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom,

Om swastyastu,

Namo budhaya,

Salam kebajikan.

Sesuai agenda, perkenalkan kami untuk pertama menyampaikan laporan integrasi unit riset kementerian lembaga ke BRIN. Bisa langsung ke halaman 3, mohon maaf. Ya, jadi secara umum integrasi unit riset KL ke dalam BRIN mengikuti Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN itu kami laksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu yang sudah kami lakukan pada 1 September 2021 yang mencakup eks Kemenristek ditambah BATAN, BPPT, LAPAN dan LIPI kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yang mengintegrasikan 28 unit riset kementerian lembaga yang sudah dilakukan pada 16 Desember dengan TMT 1 Januari 2022 dan dilanjutkan saat ini tahap

ketiga yang mencakup 6 kementerian itu sekarang sedang berjalan dan saat ini 3 kementerian sudah selesai tinggal 3 yang lain.

Berikutnya adalah pelaksanaan pengalihan, jadi sesuai Pasal 65 Perpres 78/2021. Jadi, kami telah melakukan pengalihan SDM secara kolektif tanpa syarat yaitu sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB itu diberikan waktu sampai dengan 31 Januari 2022. Sedangkan, pengalihan setelahnya masih dimungkinkan dengan skema mutasi regular sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian khusus untuk pengalihan anggaran terkait riset dan inovasi dari kementerian dan lembaga itu akan dilaksanakan pada saat ini, pada bulan-bulan ini setelah seluruh proses pengalihan asset yang saat ini tinggal 3 kementerian itu sudah selesai kami lakukan. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa eksekusi program Tahun Anggaran 2022 itu sudah kami mulai sejak bulan November 2021 dengan skema pra DIPA khususnya terkait dengan fasilitasi dan pendanaan riset pengadaan infrastruktur riset dan sebagainya. Lanjut.

Nah, dengan terkonsolidasinya berbagai sumber daya riset, jadi baik itu sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur maupun sumber daya anggaran apa yang BRIN bisa lakukan. Jadi, yang pertama adalah ini yang sebelumnya kita tidak pernah bisa melakukan, bagaimana kita bisa memperkuat SDM khususnya melalui program manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi yang bisa kita mulai dari skema anak-anak mahasiswa tingkat akhir, anak mahasiswa S2, mahasiswa S3, pasca doctoral sampai dengan professor tamu dan menjadi ASN. Di sini bisa dilihat bahwa kami menyediakan berbagai skema tidak hanya untuk periset ASN tetapi juga untuk periset non-ASN.

Yang kedua, lanjut, dengan konsolidasi infrastruktur dan anggaran yang sudah ada, kami juga bisa melakukan penguatan infrastruktur riset yang kemudian kita buka untuk bisa dipakai secara terbuka dalam bentuk *open platform* oleh para pelaku usaha maupun pihak kampus baik itu dosen maupun mahasiswa. Jadi, sebagai contoh bisa saya berikan misalnya kapal riset, kita dulu memiliki kapal riset tersebar di berbagai lembaga tetapi tidak ada satu pun yang bisa memfasilitasi 88 fakultas kelautan di negara kita, sehingga mahasiswa fakultas kelautan itu tidak pernah bisa ke laut beneran. Nah, dengan adanya penguatan infrastruktur ini seluruh kapal riset itu saat ini berada di dalam satu manajemen armada kapal riset yang kemudian bisa dipakai bersama-sama secara lebih efektif dan efisien untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan tersebut. Bahkan, bisa dipakai juga untuk kampus terapung memakai skema MBKM. Lanjut.

Nah, kemudian berikutnya adalah penguatan fasilitasi dan pendanaan yang kami buka secara kompetitif dan terbuka untuk seluruh pihak, baik itu periset BRIN, periset di kampus maupun pihak industri dan komunitas. Nah, di sini ada berbagai jenis fasilitasi yang sudah kami buka sejak tanggal 21 Desember 2021 yang lain termasuk di dalamnya yang sempat saya singgung yaitu hari layar memakai untuk mendukung aktivitas riset memakai armada

kapal riset, kemudian juga pengujian produk inovasi kesehatan, termasuk di sini adalah uji praklinis, uji klinis, uji alkes. Selain itu juga akuisisi muatan lokal dan ekspedisi untuk mengeksplorasi kekayaan biodiversitas Indonesia. Selain memang yang sebelumnya sudah ada yaitu riset untuk dukungan prioritas riset nasional serta penanganan covid-19.

Lanjut. Nah, dengan memanfaatkan berbagai skema tadi itu sebenarnya yang kami pakai untuk menyelesaikan permasalahan di Eijkman. Jadi, khusus terkait dengan Eijkman, jadi yang pertama perlu kami informasikan bahwa Eijkman itu adalah unit proyek di bawah Kemenristek, Kemristek BRIN sebelumnya terakhir ya sampai dengan bulan April 2021 dan otomatis menjadi unit proyek di bawah BRIN sejak April 2021. Dengan status sebagai unit proyek, Kelembagaan Eijkman itu tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi para civitasnya, termasuk para PNS-nya maksud kami PNS periset sehingga PNS periset di Eijkman selama ini, itu tidak pernah benar-benar di angkat sebagai peneliti dan ini tentu berdampak pada hak-hak finansial yang bisa diperoleh oleh mereka. Jadi, selama ini mereka statusnya sama seperti tenaga administrasi kalau di kementerian.

Oleh karena itu, pada saat integrasi Kemristek ke dalam BRIN pada tanggal 1 September 2021, sekaligus kami manfaatkan itu sebagai momentum untuk melembagakan Eijkman mejadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman. Dengan status kelembagaan yang sudah resmi maka seluruh PNS di, PNS periset khususnya di Eijkman itu sudah bisa langsung kami angkat sebagai Pejabat Fungsional Peneliti sebagaimana seharusnya.

Nah, kemudian bagaimana dengan para honorer, jadi periset-periset non-ASN yang selama ini cukup banyak bekerja di Eijkman yaitu total berjumlah hampir 78 orang. Jadi, khusus untuk yang sudah S3 itu kami menawarkan ASN jalur PNS bagi yang usianya kurang dari 40 tahun atau ASN jalur PPPK untuk yang usianya di atas 40 tahun. Dan 5 orang ini semuanya sudah mengikuti proses tersebut yang diumumkan hasilnya pada bulan Desember 2021. Sedangkan untuk honorer periset atau lebih tepatnya disebut asisten periset yang belum memiliki kualifikasi S3 itu kami tawarkan mengikuti tadi yang seperti saya sampaikan di halaman sebelumnya terkait dengan manajemen talenta nasional, kami tawarkan skema untuk mengikuti S2 atau S3 periset ditambah dengan skema riset asistensi di Pusat Riset Biologi Molukuler Eijkman. Dengan skema ini mereka bisa secara teknis mereka bisa terus melanjutkan pekerjaannya dan juga sekaligus mereka bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya, sehingga pada saat sudah S3 mereka akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ASN jalur PNS maupun jalur PPPK.

Jadi, perlu saya sampaikan pada tahun 2021, akhir tahun 2021 BRIN itu membuka 300.

IF-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Interupsi Pimpinan.

Jadi, terkait dengan ini, jadi sekaligus tolong Pak, izin Pimpinan, karena begini Pak, saya nggak tahu *hoax* atau tidak karena kebetulan materinya ini BRIN ini banyak sekali membuat *open call*, panggilan terbuka kemudian bagaimana mengaitkannya dengan yang istilahnya Pak Amin kemarin asisten riset yang sekaligus saya ingin lihat data dari setiap asisten riset atau yang honorer itu yang diberhentikan, kemudian Bapak bikin *open call* memang becandaannya iya-iya, supaya nggak ada pesangon kan gitu. Tapi ini harus dijelaskan Pak, apa tujuannya Bapak membuat ini kemudian dikaitkan dengan yang SDM-SDM yang sudah ada. Dan ini sudah banyak sekali bertebaran di mana-mana.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, oke baik terima kasih Bu Andi.

Mohon izin Pimpinan, sekaligus menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Bu Andi. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa seluruh skema manajemen talenta nasional itu terbuka untuk publik, baik itu *fresh graduate* maupun orang-orang yang selama ini sudah menjadi honorer tentu saja mereka terbuka selama memang mereka katakanlah mereka memiliki S1 atau S2 sesuai kualifikasinya.

Nah, untuk para honorer di Eijkman perlu saya sampaikan sesuai dengan peraturan honorer itu pasti kontraknya hanya 1 tahun dan itu akan selesai pasti 31 Desember, seluruh PPNPN itu seperti itu sehingga tidak apa, biasanya memang di awal Januari kemudian diperpanjang secara ya diperpanjang begitu ya. Tetapi seperti kita ketahui bahwa kami memang sebenarnya sudah tidak diizinkan untuk merekrut itu honorer dengan skema PPNPN. Itu sebabnya untuk kasus periset honorer itu kami menawarkan skema *by research S2, S3 by research* digabung dengan skema riset asistensif. Skema riset asistensif ini terbuka bagi mahasiswa aktif, sehingga dengan mereka mengikuti S2, S3 *by research* otomatis mereka menjadi mahasiswa aktif dan *eligible* untuk mengikuti riset asistensif. Di lain sisi ini akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kualifikasinya, sehingga nanti bisa bahkan mengikuti jalur ASN baik itu PNS maupun PPPK atau yang tidak mau menjadi ASN itu bisa mengikuti skema *post doctoral*.

Kemudian sehingga secara prinsip, jadi perlu saya sampaikan bahwa pada saat saya dilantik tanggal 28 April, tanggal 4 Mei itu saya langsung ke Eijkman karena memang saya sudah tahu bahwa *problem* Eijkman ini sejak lama. Jadi, karena pada saat itu sebagai Kepala LIPI, saya juga bertanggung jawab atas pembinaan pejabat fungsional peneliti di seluruh Indonesia di berbagai balitbang dan kementerian. Dan pada saat itu saya sudah mendapatkan permohonan permintaan bantuan dari para periset Eijkman yang PNS karena mereka merasa dirugikan selama ini mereka sudah lama bekerja, tapi tidak bisa mendapatkan status peneliti sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak fungsionalnya.

Nah, itu sebenarnya yang menjadi titik awal mengapa ini saya prioritaskan untuk diselesaikan, sehingga secara prinsip seluruh eks periset

honorar di LP Eijkman itu dapat diakomodasi bila memang mereka berminat. Dan perlu saya sampaikan pada bulan Oktober itu setidaknya di catatan saya itu ada 7 yang mengikuti S2, S3 *by research*, ada 1 orang yang di Unhas seingat saya dan sisanya hampir semua itu di FK UI. Jadi, dan bulan di pembukaan FK UI yang di bulan-bulan ini pendaftaran itu sebagian lagi dari mereka juga sedang mendaftar untuk masuk ke program S2 atau S3 di UI karena itu diterima di kampus itu menjadi satu-satunya syarat untuk bisa mengikuti S2, S3 *by research*. Kemudian selain itu walaupun mereka tidak ingin mengikuti S2, S3 *by research* mereka sebenarnya bisa masuk menjadi operator dengan skema operator. Operator penuh waktu yang itu ada di bawah Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi di BRIN karena seluruh peralatan dan laboratorium itu memang dikelola dan di-*manage* secara terpusat oleh Deputi Infrastruktur, Riset dan Inovasi.

Nah, kemudian untuk aktivitas riset, jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk riset yang berbasis nonlayanan medis itu memang sebagian besar itu akan diintegrasikan bersama-sama dengan periset terkait di Cibinong *Science Center*. Kemudian untuk riset yang berbasis layanan medis itu tetap ada di Gedung Eijkman berkolaborasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian untuk layanan uji virus yang layanan publik yaitu khususnya uji virus dan WGS dan juga koleksi dan dana itu diintegrasikan di Cibinong *Science Center* karena di Cibinong *Science Center* itu sudah ada fasilitas InaCC. Fasilitas InaCC itu adalah fasilitas untuk koleksi mikroba, baik itu bakteri maupun virus yang sudah ditetapkan oleh Perpres bahwa itu harus disimpan di InaCC. Kemudian juga di InaCC itu kami memiliki kompleks BSL (*Bio Safety Lab*) level 2 maupun level 3 yang sangat komprehensif dan juga data *center* yang sangat besar sehingga itu akan sangat efisien apabila dilakukan secara terpusat di Cibinong. Lanjut.

Berikutnya untuk Pusat Peragaan Iptek Taman Mini Indonesia Indah. Jadi perlu kami sampaikan bahwa PP Iptek TMII itu selama ini adalah BLU. Jadi di Kemristek BRIN atau Kemristek Dikti sebelumnya itu ada satu BLU yaitu Pusat Peragaan Iptek yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Selama ini jadi PP Iptek tersebut menempati lahan yang dimiliki oleh Sekretariat Negara yang dikelola oleh Taman Mini. Kemudian tapi gedung dan asetnya itu menjadi milik Kemristek, sehingga pada saat integrasi tanggal 1 September itu otomatis menjadi bagian dari BRIN. Tetapi setelah kami lakukan evaluasi secara mendalam kami mendapati fakta bahwa PP Iptek itu setiap tahun sebagai BLU itu minus kurang lebih Rp15 miliar, sehingga dari situ padahal BLU itu tidak seharusnya ada minus. Sehingga kemudian melalui berbagai kajian kami mencoba memakai mekanisme kemitraan mitra operator bersama dengan pihak swasta yang bisa melakukan tugas dan fungsi yang sama memakai fasilitas dan infrastruktur yang telah ada dan itu yang telah kami buka. Setidaknya dengan ini kami akan bisa memastikan bahwa tugas dan fungsi Pusat Peragaan Iptek atau yang nanti disebut sebagai Pusat *Science* BRIN itu bisa dilanjutkan tetapi tanpa membebani keuangan negara. Lanjut.

Mohon izin berikutnya perlu kami sampaikan, laporan pengembangan vaksin Merah Putih. Jadi, vaksin Merah Putih seperti Bapak, Ibu ketahui, jadi vaksin Merah Putih yang dibiayai dan difasilitasi oleh Kemristek, Kemristek

BRIN dan kemudian BRIN sampai akhir tahun lalu dan sampai saat ini itu ada 7 tim, yaitu tim dari ITB, tim dari UI, tim dari UI ada 2 ya kemudian Tim LBM Eijkman, Tim Unpad, kemudian Tim LIPI dan juga Tim Unair dan masing-masing ada yang sudah memiliki mitra industri, ada yang belum seperti tertulis di tayangan.

Jadi, untuk apa, ya lanjut. Nah, dalam konteks vaksin Merah Putih perlu saya sampaikan bahwa *problem* utama pengembangan vaksin Merah Putih di Indonesia itu adalah satu, yaitu bahwa kita belum memiliki tim yang memiliki pengalaman untuk mengembangkan vaksin dari *scratch*, itu nomor satu, sehingga saya tahu persis bahwa semua tim itu bekerja sangat keras untuk melakukan berbagai percobaan mencoba-coba karena memang belum pernah ada. Jadi, karena sebagian besar vaksin yang diproduksi di Bio Farma katakanlah itu memang berbasis pada lisensi. Nah, sehingga memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi para periset kita, nah tetapi di situ justru di sinilah peran BRIN. Jadi di sini bisa saya sampaikan jadi ada 3 kendala utama terkait dengan vaksin, pengembangan vaksin Merah Putih, tidak hanya vaksin Merah Putih sebenarnya tetapi vaksin secara umum di Indonesia.

Yang pertama adalah terkait pengalaman tadi bagaimana bisa menghasilkan sel klon yang sudah terseleksi dan terverifikasi. Jadi, sudah murni dan terseleksi tanpa ada patogen yang lain. Jadi, ini membutuhkan jam terbang yang luar biasa untuk bisa mendapatkan ini ditambah juga *yield*-nya harus tinggi sehingga bisa diterima oleh industri seperti Bio Farma sehingga harga vaksin itu tidak terlalu mahal.

Yang kedua, ini yang sebenarnya kami sudah ketahui sejak awal karena kebetulan saya Kepala LIPI dan di LIPI pun, salah satu tim itu ada Tim LIPI bahwa kita tidak memiliki fasilitas uji terbatas yang berstandar GMP. Jadi, katakanlah fasilitas GMP itu untuk uji produksi terbatas untuk platform protein *recombinant* misalnya itu yang fasilitas produksi, yang memiliki fasilitas produksi itu adalah katakanlah di Bio Farma. Tapi, tentu kami tidak bisa apa, mengganggu Bio Farma terlalu banyak karena Bio Farma juga harus melakukan produksi yang reguler untuk menghasilkan, apa memproduksi vaksin yang memang sedang dibutuhkan secara besar-besaran.

Nah, kemudian yang kedua adalah fasilitas animal BSL 3, ini yang sangat krusial. Itu kalau animal BSL 3 ini penting untuk melakukan uji praklinis, yang uji pertama itu memakai mencit. Kalau itu kita sudah ada jadi di Cibinong sudah ada yang besar untuk mencit tapi untuk yang Macaca ya itu kita tidak siap meskipun sebenarnya yang ada itu ada di PPSP IPB, tetapi itu apa harus kami renovasi dan itu dibiayai dari BRIN sampai akhir tahun lalu itu sudah selesai kami renovasi tetapi belum tersertifikasi. Jadi, sekarang masih dalam proses akan disertifikasi, sedangkan yang Balitvet Bogor itu praktis sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah terlalu lama. Untuk itulah pada saat ini BRIN ya sebenarnya sejak tahun lalu itu berupaya membangun fasilitas GMP untuk uji produksi terbatas ini termasuk untuk animal BSL 3 Macaca dengan kapasitas 80 ekor.

Dan perlu kami sampaikan bahwa ini sama sekali tidak murah. Jadi, sebenarnya dulu sudah saya sampaikan bahwa ke Pak Menristek pada saat itu bahwa LIPI sanggup membiayai pembangunan animal BSL 3 untuk Macaca tapi kami tidak sanggup untuk membuat program yang berkelanjutan, sehingga bisa memanfaatkan infrastruktur yang mahal dibangun itu. Tapi *alhamdulillah* dengan proses integrasi di BRIN kami bisa memiliki fasilitas dan kompetensi untuk membuat program yang bisa memanfaatkan tidak hanya membuat fasilitas yang mahal ini hampir 300 miliar, tapi juga membuat program yang berkelanjutan untuk memanfaatkan fasilitas itu tadi programnya adalah program hibah uji klinis yang tadi saya sampaikan di halaman sebelumnya. Sehingga kami berharap dengan adanya dua fasilitas ini Insya Allah pada kuartal kedua tahun ini kita bisa mendorong percepatan tidak hanya sebenarnya vaksin Merah Putih, tapi juga berbagai vaksin yang lain. Apalagi teman-teman, saya yakin teman-teman yang sudah terlibat di vaksin Merah Putih ini akan memiliki jam terbang yang cukup memadai untuk bisa mengembangkan vaksin yang lain karena kita memerlukan berbagai vaksin, tidak hanya untuk manusia seperti hepatitis, HPV dan sebagainya tetapi juga untuk hewan yang kita juga masih impor. Lanjut.

Nah, di sini masih terkait dengan vaksin. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 seperti yang telah disetujui oleh Bapak, Ibu Komisi VII DPRRI bahwa kami tetap ada fokus untuk penanganan riset Covid-19 yang kami lebih fokuskan lagi pada tiga hal, yaitu apa dukungan untuk pengembangan vaksin Merah Putih, kemudian untuk pengembangan alat deteksi yang non RT PCR serta untuk mendukung *surveillance* berbasis *whole genome sequencing*.

Dengan integrasi layanan *whole genome sequencing* dari Eijkman dan LIPI jadi tadinya di Eijkman itu rata-rata 198 sampel, kalau di LIPI itu kurang lebih 100 sampel setiap harinya. Nah, itu semua sekarang sudah digabung di Cibinong dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan yang lebih penting biaya untuk melakukan *whole genome sequencing* itu bisa ditekan jauh lebih murah karena semuanya dijadikan satu.

Kemudian untuk, perlu kami sampaikan juga bahwa BRIN secara prinsip kami sejak awal itu juga mendukung apa pengembangan tidak hanya vaksin Merah Putih berbasis virus yang dilemahkan *inactivity* virus, tapi juga apa dan protein rekombinan tetapi juga berbasis platform yang baru DNA, mRNA dan sebagainya karena seperti tadi saya sampaikan jadi kesempatan, memberikan kesempatan kepada para periset kita untuk memiliki jam terbang mengembangkan berbagai vaksin dari *scratch* untuk berbagai *platform* itu sangat penting. Jadi, ini adalah satu pelajaran yang secara personal saya sebagai Kepala LIPI pada saat itu sangat merasakan betapa beratnya kita karena kita tidak memiliki jam terbang pada saat itu sama sekali.

Selain itu, kami juga mendukung pengembangan vaksin BUMN yang berbasis bibit vaksin yang sudah jadi dari *Baylor College Medicine*. Jadi, mengapa kami ikut mendukung itu, jadi dari awal pada saat itu memang Pak Erick Thohir menyampaikan kepada saya, kebetulan pada saat itu saya baru dilantik dan saya sampaikan bahwa saya tetap mendukung itu karena

bagaimanapun juga pengembangan yang saat ini kita lakukan itu adalah riset dan untuk riset saya tidak bisa menjamin bahwa itu 100% pasti jadi. Saya tidak bisa dan secara etika itu tidak diperbolehkan, kalau selama kita melakukan riset itu kita masih selalu ada kemungkinan itu kegagalan, entah di tahapan yang mana. Nah, sebagai *plan B* jadi waktu itu saya sampaikan silakan kalau memang ada alternatif yang memakai bibit vaksin yang sudah jadi ya karena itu adalah satu tahapan tersendiri yang memang cukup sulit, tetapi tahapan setelahnya itu saya yakin juga dilakukan di Indonesia jadi itu praktis 70% juga *made in Indonesia*. Lanjut.

Ini mungkin yang terakhir karena setelahnya itu adalah lampiran yaitu ini apa pembangunan animal BSL 3 untuk Macaca yang saat ini juga sedang berjalan di Cibinong *Science Center*. Jadi, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini menjadi sarana yang kunci, tidak hanya untuk BRIN, tidak hanya untuk teman-teman di kampus tetapi juga industri farmasi kita secara keseluruhan. Jadi, dengan apa setelah adanya BRIN ini kita sanggup, salah satunya ini salah satu contoh riil bagaimana dengan konsolidasi sumber daya khususnya infrastruktur dan anggaran serta manusianya kita sanggup melakukan ini karena ini tidak hanya masalah infrastruktur saja, tetapi untuk mengelola infrastruktur ini sehari-hari secara profesional kita membutuhkan ahli-ahli hewan, *zoonosis*, ahli-ahli *zoology* yang kebetulan semuanya sudah ada di Cibinong. Sehingga ini akan membuat seluruh pembiayaan itu menjadi jauh lebih murah karena di Cibinong kita memiliki setidaknya 700 periset berkait lab *scientist* dan 300 diantaranya itu bahkan Phd dan sebagian diantara itu bahkan para diaspora yang memang kita rekrut sudah tahun 2018 dan khususnya tahun lalu itu kami merekrut sebanyak 325 orang dan tahun ini dan tahun-tahun kedepan itu kami harapkan bisa merekrut 500-an orang setiap tahunnya.

Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Pimpinan. Mohon izin.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon izin untuk

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPRRI,
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII, baik yang hadir secara *offline* maupun hadir secara *online*,
Bapak Kepala BRIN dan peserta RDP pada sore hari ini.

Izinkan kami dalam beberapa waktu ke depan untuk mencoba menginformasikan terkait beberapa agenda yang akan kita bahas pada sore

ini. *Slide*. Ada 2 (dua) agenda yang akan kami sampaikan Bapak Pimpinan, yang pertama terkait informasi kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Bio Farma dengan semua lembaga riset yang ada dalam negeri, tidak hanya lembaga riset yang ada di perguruan tinggi tetapi juga lembaga riset lainnya, seperti: LIPI, Eijkman dan lain-lainnya, Balitbangkes dan lain-lainnya. Dan agenda kedua kami juga akan memberikan *update* terkait progres pengembangan vaksin Merah Putih dan juga Vaksin BUMN itu sendiri. *Slide*-nya sudah bisa di ini. Sambil menunggu *slide*-nya bisa ditayangkan.

Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota.

Jadi, kolaborasi antara Bio Farma dengan semua lembaga riset perguruan tinggi di Indonesia ini memang sudah dilakukan sangat lama sekali dan kami juga dengan lembaga riset tersebut sudah membentuk suatu forum yang kami sebut dengan Forum Riset Indonesia yang sudah kita lakukan sejak tahun 2012 yang lalu. Ada belasan lembaga riset yang bergabung dalam forum riset tersebut dan juga sudah banyak juga produk-produk yang sudah kita lakukan kolaborasi bersama, meskipun sebagian besar itu masih dalam tahap pengembangan dan mungkin ada beberapa yang sudah bisa menjadi produk yang siap untuk di komersialisasi. Sebagai contoh kami juga melakukan kolaborasi dengan ITB, dengan UI, Unair, UGM, IPB, Universitas Andalas, Brawijaya, dengan Eijkman, BPPT, LIPI, BATAN dan banyak lagi lembaga riset lainnya dan beberapa produk yang sedang dalam proses, seperti untuk produk deteksi malaria ataupun vaksin juga malaria, influenza, Hepatitis B dan berbagai macam kolaborasi produk lainnya. Dan juga ada konsorsium vaksin nasional dan beberapa pilot proyek yang sudah kita inisiasi, seperti pengembangan vaksin *New TB* dan juga pengembangan vaksin *Dengue* kemudian juga pengembangan dari Hepatitis B dan juga pengembangan vaksin lainnya, seperti malaria dan juga SIV. Dan juga dari banyak riset.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Ketua, izin.

Mungkin kalau boleh langsung aja menjelaskan *point* tentang vaksin Merah Putih, jadi itu lebih fokus. Kalau ini kan bisa kita baca, mohon maaf ya Pak.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Setuju.

Saya kira untuk menghemat waktu juga kita sudah cukup lama di ruangan ini. Saya kira *to the point* kita bahas mengenai vaksin Merah Putih Pak.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan. Kami akan lanjut langsung ke pengembangan vaksin Merah Putih.

Jadi, sebelum kami masuk ke konten mungkin kami bisa menjelaskan dulu sebentar terkait strategis *supply* vaksin Covid yang ada di Indonesia.

Jadi, memang ada 3 (tiga) strategi yang kita kembangkan, *short time* itu adalah bagaimana untuk segera memenuhi suplai kebutuhan vaksin covid yang ada di Indonesia. Ini yang langsung kita lakukan apakah vaksin impor jadi dengan berbagai macam pengembangan, seperti: *Pfizer, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca*, dan *Sinovac* dan juga *Novatec*. Kemudian juga ada jangka pendek kita memproduksi *bulk*. Jadi, kita impor *bulk* dari pengembangan vaksin seperti *Sinovac* dan kita produksi di kapasitas produksi yang ada di Bio Farma sendiri.

Kemudian juga *mid term*-nya itu juga kita lakukan pengembangan vaksin. Untuk vaksin Merah Putih dan vaksin BUMN ini termasuk ke kategori *mid term* karena memang kita masih butuh waktu untuk pengembangan sampai menjadi vaksin jadi. Dan untuk *long term*-nya adalah pengembangan vaksin yang berbasis teknologi baru karena selama pandemi ini kita tahu ada berapa platform baru muncul, seperti: *mRNA, viral vector, DNA* dan sebagainya.

Terkait untuk vaksin Merah Putih sendiri kami memang lagi intens kerjasama dengan Lembaga Eijkman untuk membuat suatu *platform* vaksin berbasis rekombinan dan sampai saat ini prosesnya adalah kita sudah berhasil melakukan optimalisasi SIR vaksin dari Eijkman ini, sehingga sudah memenuhi standar industri. *Problem* yang paling lama kemarin memang dari dua kali proses sebelumnya, SIR vaksin yang kita dapatkan dari Eijkman ini belum memenuhi standar industri sehingga itu memang sulit untuk diproduksi, baik dari sisi kualitasnya nanti dan juga soal harga vaksinnya mungkin akan sangat mahal. Sehingga, kami terus melakukan bersama-sama dengan Eijkman, ada peneliti dari Eijkman sampai hari ini pun masih melakukan kerjasama dengan tim kami di Bandung, di Pasteur Bandung untuk pengembangan SIR vaksin ini dan *Alhamdulillah, prototype* yang ketiga ini sudah memenuhi skala industri dan kita akan segera masuk ke tahap uji praklinis yang dengan Eijkman.

Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala BRIN dalam pengembangan produk-produk vaksin ini memang risikonya sangat tinggi, bisa saja proses itu sudah kita mulai dan untuk setiap tahapan itu pasti ada resiko kegagalannya. Mungkin Bapak, Ibu mungkin pernah dengar ada satu vaksin covid yang dikembangkan oleh pengembang *CureVac* namanya di Jerman. Mereka itu udah sampai ke tahap 3 dan pada saat selesai uji tahap 3 ternyata tidak memenuhi standar WHO, sehingga dia harus mulai lagi dari nol. Untuk menghindari seperti ini dan *me-manage* resiko, memang kami mengembangkan *platform* baru bekerja sama dengan *Baylor College Medicine* karena memang harus kita lakukan, kita tidak bisa bergantung hanya pada satu jenis vaksin, pada saat gagal itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi, memang pengembangan vaksin BUMN ini kita lakukan untuk menjadi opsi seandainya nanti ada faktor-faktor keterlambatan ataupun kegagalan dari pengembangan vaksin yang lainnya. Dan sampai saat ini yang kerja sama *Baylor College*

Medicine, anggota kita sekarang *project*-nya kita sebut dengan Vaksin BUMN itu sudah memasuki proses uji klinis tahap 1 yang kita lakukan di Puskesmas Depok.

Jadi, untuk lebih detailnya untuk pengembangan Vaksin BUMN ini kami mengembangkan 2 (dua) formula: satu, adalah formula yang kita menggunakan *adjuvant*. *Adjuvant* ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari vaksin itu sendiri. Kita menggunakan *adjuvant alum* dan formula kedua kita menggunakan *adjuvant* yang disebut dengan *CpG*, ini juga lagi dalam proses. Untuk yang formula pertama yang menggunakan *adjuvant alum* ini sudah kita mulai uji klinisnya dari Desember kemarin dan sampai hari ini sudah dilakukan penyuntikan kedua daripada semua relawan yang terlibat di mana relawannya kita lakukan 30 subjek dewasa dan 30 sebagai pembanding dan juga termasuk lansia. Kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UI sebagai CRO untuk pelaksanaan uji klinis vaksin BUMN berdasarkan *alum* ini. Kemudian juga vaksin BUMN ini sudah kita daftarkan di WHO karena ini juga ada bagusnya kita mendaftarkan, sehingga dunia juga tahu ada perkembangan berbagai jenis vaksin yang ada di belahan negara yang lain.

Kemudian ada juga formula kedua yang kita kembangkan, ini menggunakan *adjuvant CpG* dan ini prosesnya sekarang sudah melakukan proses preklinis dan rencana kita Februari nanti akan dimulai untuk melakukan proses uji klinis tahap 1-nya, di mana untuk mengetahui faktor *safety* dari vaksin itu sendiri.

Nah, terkait dari *timeline* vaksin BUMN ini dari semua proses yang kita lakukan, mulai dari vasa 1, vasa 2 dan 3 kita targetkan nanti di bulan Juli 2022 kita akan segera mendapatkan *emergency use authorization* dari Badan POM dengan catatan memang semua proses uji klinis itu sudah memenuhi kriteria dan memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan baik oleh Badan POM sendiri maupun oleh WHO. Nah, inilah sekarang yang kami masih *manage timeline* ini, kami berharap yang untuk vasa 1 ini segera selesai uji klinis tahap 1. Kemudian untuk formula 2 kita akan mulai awal Februari 2022 dan kita rencanakan nanti *Insyallah* kalau semua berjalan lancar, Juli 2022 semua sudah bisa EUA dan akan segera kita produksi secara massal di kapasitas produksi Biofarma. Kami sudah menyiapkan total kapasitas sebenarnya itu adalah 250 juta dosis per tahun.

Demikian Bapak Pimpinan. *Up date* terkait pengembangan vaksin Merah Putih dan vaksin BUMN yang dilakukan di Bio Farma.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih atas pemaparannya.

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak, Ibu Anggota Komisi VII DPRRI untuk melakukan pendalaman, memberikan tanggapan maupun pertanyaan sesuai protokol kesehatan dan Tatib DPRRI. Mohon Ibu/Bapak Anggota bertanya maksimal 5 menit dan kita mulai dari anggota yang hadir secara fisik di dalam ruangan.

Dari Fraksi PDI Perjuangan kami persilakan. Tidak ada? Kami lanjutkan dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Roro, silakan.

F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Baik, Pimpinan.

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII dan tentu di sini Bapak Kepala BRIN beserta Dirut PT Bio Farma dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini.

Yang pertama tentunya terima kasih ya atas penjelasan karena kan kemarin di rapat sebelumnya banyak sekali pertanyaan yang berbasis bagaimana dengan SDM, baik itu yang *existing*, lalu kemudian juga yang akhirnya hasil dari integrasi ini tidak lagi bergabung di dalam BRIN. Saya melihat bahwa memang pada dasarnya ada sebuah tekad untuk meningkatkan kualitas para *researcher* yang ada. Jadi, suatu hal yang saya rasa patut kita apresiasi bersama, karena tidak lepas lagi juga dari bagaimana ini akan mempengaruhi kualitas kelembagaan secara keseluruhan. So, ini bagus menurut saya. Namun, saya ingin mempertanyakan karena kan ini memang sebuah permasalahan yang cukup meresahkan banyak orang gitu. Nah, maka berdasarkan, mungkin data yang Bapak memiliki gitu ya kemarin hasil dari peleburan ataupun integrasi ke dalam BRIN, terkhusus yang dari Lembaga Eijkman dan mungkin lembaga-lembaga lainnya itu kita kehilangan berapa orang, Bapak. Jadi, itu yang saya ingin mengetahui terlebih dahulu.

Lalu kemudian berikutnya langsung berkaitan mengenai vaksin Merah Putih tadi di *page* berapa ya? Intinya mengenai vaksin Merah Putih ini tadi sempat kita bahas juga bahwasanya dan ini sudah pernah saya tanyakan sih sebelumnya yaitu adalah dengan berjalannya waktu kan ternyata Covid-19 ini kan mulai ini ya, dengan apa berkembangnya varian-varian baru, baik itu Delta, Omicron dan lain sebagainya. Apakah itu berdampak ataupun bagaimana kita menyiasati hal tersebut gitu dengan kualitas vaksin Merah Putih yang tadinya ditargetkan untuk memberi solusi terhadap permasalahan Covid-19 ini yang di mana ternyata sekarang variannya sudah bermunculan yang baru itu. Nah, itu bagaimana kita menyiasati hal tersebut.

Lalu kemudian yang terakhir kepada Bapak Dirut, *I wanted to say*, saya ingin menanyakan mengenai tadi ya, jadi vaksin juga yang dikembangkan oleh BUMN kalau tidak salah berarti ya Pak ya. Nah, ini apa perbedaan intinya dibandingkan vaksin Merah Putih yang saat ini dikembangkan. Saya sih berharap bahwasanya vaksin Merah Putih yang pada intinya itu tekadnya kan luar biasa ya ini, dari satu sisi kita memperkayakan SDM lokal dan kita juga berusaha bagaimana komponennya itu juga kalau bisa mayoritas lokal gitu. Ini kan sungguh sebuah kebanggaan negara kita dan saya berharap bahwa di samping bisa menjawab permasalahan ataupun *problem* besar ini saat ini, kita juga bisa berdaya saing sebetulnya ya secara global. Jadi, tidak hanya mengatasi Covid di dalam negeri saja, tetapi juga bisa *you know*, bisa membantu mengatasi di luar negara Indonesia. Jadi, dari sini kan ada semacam apa daya saing dan apa membuktikan juga kepada dunia gitu loh bahwa sebetulnya kita juga bisa dan mampu.

Nah, ini menurut saya sebuah *opportunity* yang harus kita betul-betul harus kita pegang dan mudah-mudahan tentunya tekad kita bersama ini bisa dirasakan sejatinya oleh masyarakat.

Tiga pertanyaan itu untuk kali ini, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumuasalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Roro.

Dilanjutkan Fraksi Gerindra, Pak Subarna silakan Pak.

F-GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Komisi VII, Bapak/Ibu yang hadir pada saat ini.

BRIN ini sebuah lembaga yang hari ini merupakan kapal besar riset kalau tadi berbicara, ini luar biasa mungkin berharap banyak dengan BRIN ini. Ini sudah ditetapkan, mau tidak mau kita harus mendukung keberadaan BRIN ini, tapi satu hal yang harus Bapak catat, ini saya mengingatkan saja. Pertama, karena sumber daya manusia ini, sumber daya manusia ini karena berbagai lembaga, masuk. Tolong amankan sumber daya manusia yang ada di kita karena walaupun bagaimana ini merupakan tanggung jawab Bapak sebagai

kepala besar ini. Jadi, jangan sampai ada yang gara-gara disatukan malah banyak yang terbang sumber daya manusia. Itu yang pertama.

Yang kedua peralatan dan perlengkapan, ini otomatis akan disatukan jadi ada di Cibinong, ada di mana, sudah barang tentu ini jangan sampai nanti suatu saat saya mendengar ada kericuhan, ada kekurangan tentang peralatan perlengkapan ini gara-gara disatukan, biasanya kan suka begitu, hilang dan lain sebagainya, ini tolong dijaga.

Yang kedua tadi berbicara Bapak tentang penelitian sekarang itu pembiayaannya akan semakin murah dan biaya mungkin semakin kecil. Bahkan tadi berbicara mungkin ke depan itu BRIN ini akan lebih cenderung kepada tanpa membebani uang negara dengan penelitian ini, ada kalimat seperti itu. Hal ini terus terang saja saya di era sekarang ini banyak sekali berbicara tentang tanpa membebani uang negara, hampir secara keseluruhan, proyek-proyek besar seperti itu. Tapi sesuai kenyataan saya malah melihat dari berbagai persoalan yang ada di negeri ini malah ke luar saja ini contoh saja tentang di luar ini, misalkan kereta cepat, saya berpikir wah ke depannya akan membebani uang negara, pada awalnya tidak membebani biaya negara. Hal ini juga mudah-mudahan BRIN tidak demikian, ini perhitungan saya ke depan. Jadi, kalimat tanpa membebani uang negara, dengan pembiayaan lebih murah ini diharapkan BRIN seperti itu, mudah-mudahan seperti itu.

Yang selanjutnya ini tentang vaksin Merah Putih, ini kedengarannya tadi ada kegagalan dan sebagainya, ini kesannya pesimistis Pak. Dulu zaman Eijkman optimis sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi Pak. Mudah-mudahan nanti ada kesan kalau pesimis dan gagal ini gara-gara penggabungan. Mohon maaf tanda kutip ini, bisa jadi seperti itu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu Pak, sekali lagi pesimistis kita optimislah. Jadi, kesan itu jangan sampai terjadi.

Saya rasa itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Subarna.

Dilanjutkan dari Fraksi Partai Nasdem Pak Rico Sia, silakan.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih Pimpinan, terima kasih rekan-rekan baik yang hadir secara fisik maupun secara *virtual*. Terima kasih untuk paparan yang sudah diberikan baik oleh Bapak Kepala BRIN maupun Direktur PT Bio Farma.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Apa yang saya mau ngomong tadi kebetulan sudah disampaikan oleh Pak Subarna. Jadi, tidak akan saya ulangi lagi. Saya mungkin hanya ingin satu kepastian, kepastian ini dulu pernah dijawab oleh Pak Menristek Pak Bambang, Vaksin Merah Putih akan jadi pada akhir tahun 2021. Sekarang sudah tahun 2022, kemarin dalam pertemuan kita mundur lagi ya ke akhir tahun 2022, kalau boleh 2023 atau kalau boleh lebih jauh lagi 2027. Mungkin itu ungkapan kekesalan saja sih Pak dari saya karena jauh-jauh saya dari Papua Barat berharap duduk di sini ikut hadir memikirkan bagaimana caranya supaya harapan kita untuk Indonesia menjadi negara produsen yang dikenal oleh dunia, ternyata mulai redup rasanya dengan tadi penjelasan yang tadi. Bahwa ini kita masih ada penelitian ini, kita masih ada kurang ini, saya yakin Pak saya masih yakin, masih optimis bahwa jiwa nasionalis kita, bangsa kita dengan SDM yang ada mestinya bisa Pak. Saya yakin Pak, ada Bapak Direktur Biofarma, ada Bapak Kepala BRIN yang notabene adalah orang hebatnya BRIN yang memang sekarang duduk di kursi nomor satunya. Yuk, Pak, kita bantu negara kita agar dilihat oleh negara luar bahwa negara ini hebat. Tidak hanya terus meneliti saja. Ayo bangkit semuanya yang ada yang mendampingi Bapak, baik dari Bio Farma maupun dari BRIN. Tolong bantu negara kita agar tidak hanya dilihat sebagai, oh orang melakukan penelitian aja dan melakukan penelitiannya aja. Kalau perlu kita bikin kayak seperti Cina udah di luar dari konteks ini mereka malah udah bikin 6G dengan penelitian mereka dengan teknologi mereka. Saya yakin Pak, Bapak terlalu hebat Pak sebagai Kepala BRIN untuk membuat inovasi-inovasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Diah tadi bagaimana perkembangan, tadi apa, virus itu sendiri dan lain sebagainya.

Dengan Bapak Direktur Bio Farma, Pak bantu Pak, Indonesia dan penelitian-penelitian yang ada, kalau boleh dipercepat, dipercepat saja. Kalau terkait dengan faktor anggaran ya mari kita bahas sama-sama di sini ya. Ini kan untuk Indonesia ya Pak, kalau kita masih ada pikiran yang soalnya yang lain lagi kasihan Pak. Kita diketawain negara lain Pak. Masa sih kita biarin peneliti kita, negara kita diketawain sama negara lain karena berulang kali di dalam rapat terbuka juga orang ngelihat-lihat ini terus. Oh, janji, janji, janji. Sayang Pak rasanya kita duduk capek-capek terus di sini untuk membahas ini berulang-ulang kali, yang kemudian akhirnya *deadline*-nya mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, yang diketawain kita semua yang ada di sini, baik itu hanya pendorong bukan hanya, bukan untuk menjustifikasi kita. Tapi, mudah-mudahan itu menjadi dorongan buat kita semua, untuk negara kita tercinta ini.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih rekan-rekan dan terima kasih semua saudara-saudariku yang tercinta. Terima kasih, Pimpinan.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Rico Sia.

Lanjut Fraksi PKB, silakan Pak Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera.

Pimpinan, sahabat-sahabat Komisi VII,
Pak Kepala BRIN serta seluruh jajaran, di sini Pak, kemudian
Direktur PT Bio Farma beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Tentu gagasan menjadikan BRIN ini sebagai lembaga yang besar, yang kuat, yang bertajih, efektif, produktif ini patut kita apresiasi. Namun, biasanya kalau dalam kelahiran barang-barang besar atau lembaga-lembaga besar itu menghasilkan dampak-dampak yang mesti kita, karena tugas Komisi VII ini mengawasi. Jadi, mesti kita perhitungkan.

Ada banyak pertanyaan publik terkait BRIN. Yang pertama, personil yang diintegrasikan itu kira-kira kalau saya hitung ini, dari tiga tahap ini sekitar ya 14 ribuanlah kira-kira, kurang lebih, kurang lebih dari 3 tahap ini. Itu bukan perkara mudah menengok pengalaman Kementerian Daerah Tertinggal ke Kementerian Desa yang bersumber personelnya dari seluruh K/L dan juga Kementerian Perikanan zamannya Pak Sarwono itu juga bersumber dari semua K/L dan rata-rata itu jadi *problem* di kemudian hari ternyata Pak karena orang-orang yang diambil ini adalah orang-orang istilahnya sisa-sisa. Saya kira juga K/L-K/L yang ada sekarang ini bukan sisa-sisa apa namanya, orang-orang yang memang mau diserahkanlah kira-kira bahasa halusnyanya begitu. Akhirnya apa? Dalam *attitude* tradisi di KKP maupun di Kementerian Desa itu jadi banyak yang tidak baiklah, politiknya tinggi, intriknya tinggi dan sebagainya. Saya tahu karena kebetulan saya ngikuti sejak awal dari Perikanan KKP sampai daerah tertinggal menjadi Kementerian Desa, itu hasil integral Pak, personilnya itu.

Pertanyaan saya yang pertama karena ini integrasi berarti ada yang ditinggalkan, ini nasib para peneliti atau para orang-orang yang berkualitas ini seperti apa dan saya ingin ada gambaran dari BRIN kalau misalnya tadi disampaikan. Saya sudah dengar juga di TV dan tadi saya sudah dengar lagi Pak Kepala ngomong tapi saya ingin ada jaminan bahwa tidak ada orang-orang yang berkualitas tercecer itu tidak menempati sesuatu tempat yang sepatasnya di BRIN. Itu yang pertama.

Yang kedua, tidak ada orang-orang yang karena integrasi ini berakibat fatal bagi penghidupannya dan tidak ada orang-orang yang karena integrasi ini karirnya juga *mandek*. Jadi, tiga hal itu yang mesti dibuka secara terbuka skemanya oleh BRIN karena kan banyak orang ya kita nggak tahu. Ini yang muncul ke permukaan cuma Eijkman saja, saya kira yang lain juga rame, apalagi kan ada somasi banyak profesor itu ya, berarti kan memang ada

masalah. Menurut saya Pak, *panjenengan* itu buka aja secara terbuka apa namanya skema. Skema integrasi itu dan menyampaikan ke publik bahwa itu apa yang mereka ragukan itu sesungguhnya tidak terjadi. Ini membantu *panjenengan* ini. Jadi, itu menurut saya. Jadi, perlu ada komunikasi publik yang bagus, tetapi juga bukan hanya komunikasi tetapi data yang terbuka yang bisa kita lihat dan diakses oleh semua pihak terkait ini. Itu yang terkait dengan integrasi ada 3 (tiga) yang perlu dijamin.

Yang kedua, ini kan K/L-K/L ini pindah gabung di BRIN Pak ya. Misalnya penelitiannya pertanian, penelitiannya perikanan dan sebagainya ini pindah semua. Pertanyaan saya nanti kalau K/L ini butuh data, cara ngasihnya ke K/L ini bagaimana supaya gampang dan cepat dan tidak pakai tip-tip-an dan tidak birokrasinya panjang. Ini kan sekarang di BRIN nih ya, datanya di BRIN semua dengan asumsi dia. Pertanyaan saya adalah kalau salah satu K/L ini butuh data, data yang cepat untuk analisis kebijakan mereka, untuk mengambil keputusan mereka bagi mereka, ya itu gimana caranya biar itu cepat dan tidak birokratis lagi karena salah satu tujuan mereka punya litbang sendiri itu kan biar cepet mereka bisa kontrol dan sebagainya bisa, bisa efisien. Itu ada jaminan nggak itu. Jadi, jangan sampai ada birokratisasi di sana atau muter ke mana-mana lagi. Jadi, akhirnya pengambil kebijakan di lembaga-lembaga yang ada itu lalu panjang prosesnya, butuh waktu lama. Itu dua untuk BRIN.

Untuk Bio Farma. Saya kira saya setuju bahwa vaksin Merah Putih ini itu merupakan apa ikhtiar kita untuk mencapai tidak hanya vaksin Merah Putih tetapi juga kebanggaan bagi Bangsa Indonesia. Jangan sampai ini sudah dibangga-banggakan oleh presiden, oleh menteri, oleh banyak tokoh ternyata nanti satu lama seperti kekhawatiran Kakak Rico tadi, yang kedua tidak sukses. Jadi, menurut saya harus ada perhatian khusus, fokus khusus untuk ini dan segala upaya harus kita lakukan untuk kesuksesan vaksin Merah Putih. Walaupun, saya juga bertanya, vaksin saya ini karena awam sih soal vaksin ini. Vaksin Nusantara ini posisinya di mana dan vaksin BUMN tadi kan sudah disampaikan termasuk yang diajukan ke WHO kan. Nah, vaksin Nusantara ini posisinya seperti apa yang digawangi oleh Pak Terawan ya kalau tidak salah ya. Nah, itu terkait Bio Farma tapi prinsip kita dukung, kita dukung, tinggal bagaimana Bapak-bapak menggunakan semua potensi yang ada, kerja sama yang ada ini bisa efektif. Jangan kerja sama justru tidak efektif karena Indonesia kan biasa kan kita saling kenallah ego sektoral, eksistensi masing-masing lembaga di bawah kuat-kuat masing-masing. Sehingga, kalau tidak ada kepemimpinan yang kuat itu nggak kuat sama dengan BRIN ini, kalau nggak ada kepemimpinan yang kuat bisa *collapse* ini Pak, ini barang ini Pak. Itu yang ketiga yang ingin saya tanyakan, tapi harus dibedakan yang kuat atau arogan itu harus ada bedanya, yang kuat itu artinya mengambil kebijakan secara efektif, produktif dan efisien. Kalau arogan itu artinya siapa temennya, siapa yang dia tidak suka itu yang dia paksa, itu bedanya itu di situ. Saya mohon maaf bukan ngajarin tapi namanya DPR itu harus mengingatkan jangan sampai itu terjadi. Fungsi kami memang di situ nggak ada lain ya.

Jadi, mungkin itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena banyak orang yang mau bertanya dan tidak harus dijawab hari ini, boleh tertulis nggak apa-apa tapi harus dijawab.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Karding.

Berikutnya dari Fraksi Partai Demokrat, silakan Pak Sartono.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Eddy yang kami hormati sahabat Komisi VII, baik yang hadir fisik maupun *virtual*, Pak Tri Handoko dengan segenap jajaran Kepala BRIN, dan juga Pak Dirut Bio Farma yang kami hormati.

Tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kepala BRIN Pak Handoko. Tadinya saya ingin apa menyampaikan agak kelas itu Pak Tri tapi tadi sudah mendengarkan jawaban tadi Bapak mengurai gitu masukan-masukan dari masyarakat dan juga kita semua gitu tentang SDM riset tadi dikategorikan ada berapa PNS di situ, ada periset honorer, ada asisten periset honorer dan memberikan kepastian hukum dan status pada civitas ya begitu ya Pak Tri Handoko. Nah, sebetulnya permasalahan ini kemarin tuh kan mungkin sosialisasi, mungkin dadakan ya, ada *culture shock* kagetlah begitu tapi kalau tadi Bapak bisa memberikan penerangan secara utuh kepada para sahabat, itu mungkin tidak begitu ada suatu gejolak begitu yang luar biasa. Yang jelas kami menginginkan bahwa Pak Kepala BRIN itu dalam periode-periode inilah ya dapat melaksanakan pengintegrasian, ini harus tanpa gejolak dan juga berlangsung secara *smooth*-lah kurang lebih begitu membawa tentu ada lompatan atau kemajuan iptek-lah ke arah yang lebih baiklah kurang lebih itulah sebetulnya. Kami karena juga bagian dari pada BRIN juga di Komisi VII ini akan, begitu akan memberikan suatu dorongan dan jangan sampai terjadi permasalahan atau gejolak, itu yang waktu itu kami khawatirkan. Tadi Pak Tri Handoko juga memberikan penjelasan, penerangan harapan saya begitu ya Pak Tri ya apa dijalankan betul gitu apa yang Bapak sampaikan.

Kedua juga tentang ini Pak yang saya tanyakan bagaimana riset-riset atau di kementerian teknis itu integrasinya begitu. Saya juga ingin tahu *progress*-nya. Apakah mereka langsung di bawah satu gedung dengan BRIN ataukah mereka masih tetap di dalam kementerian-kementerian teknis di dalam penelitiannya, tetapi tetap dalam koordinasi, atau payung, atau rumah besar daripada BRIN itu mungkin saya perlukan jawaban dari Bapak.

Untuk berikutnya Bio Farma, tadi saya pikir sahabat juga Mbak Roro menyampaikan begitu cepatnya ini masalah virus ini ada varian baru dan kita tidak tahu lagi nanti setelah Omicron ini, apa lagi begitu. Yang jelas harus maju terus gitu, tidak boleh berhenti begitu, apa pun harus paripurna juga tentang produksi dari vaksin ini. Yang juga perlu menjadi pertanyaan nanti produksi vaksin, pasarnya itu bagaimana nanti ke depannya. Saya pikir perlu juga kita persiapkan juga dan vaksin Merah Putih maupun vaksin BUMN diproduksi yang pasti secara banyak ya, pangsa pasar apakah sudah juga kita telah tentukan juga dan juga apakah Rakyat Indonesia mau divaksin dengan vaksin tersebut. Ini juga perlu apa kita adakan penelitian gitu, tentunya kita kan juga ikut mensosialisasikan juga nanti di parlemen. Apa upaya yang akan dilakukan, tentunya di sini BRIN ya dalam memperkuat di dalam penelitian daripada Bio Farma ini. Dan apa fasilitas produksinya bagaimana juga Bio Farma, Bapak mungkin perlu pendalaman nanti.

Ini kurang lebih mungkin yang saya tanyakan dan juga berikan apresiasi gitu dan mohon begitu Pak Tri untuk implementasi, ada kepastian hukumlah bagi sahabat kita, saudara-saudara kita ini.

Demikian. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Sartono.

Kami lanjutkan Ibu Andi Yuliani Paris setelah itu.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

PKS dulu dong Pimpinan. Pimpinan kok di lewat.

KETUA RAPAT:

Ya Pak kita mulai dengan teman-teman yang hadir di sini dulu Pak Mul.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Kan biasanya per fraksi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nggak memang kita, ngga Pak, dari kemarin kita sudah minta teman-teman yang hadir fisik dulu baru nanti setelah itu langsung diputar dengan teman-teman yang hadir secara *online*, mohon bersabar sebentar Pak.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik, habis Bu Andi, saya daftar ya, Pimpinan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Izin Pimpinan, ketika saya menyampaikan pertanyaan ada beberapa yang saya ingin interaktif dan langsung dijawab oleh Kepala BRIN.

Pertama, tadi soal Kapal Baruna ya kapal riset dan Bapak mengatakan bahwa tidak ada satu pun Fakultas Perikanan Kelautan yang menggunakan. Itu menyakitkan lagi itu Pak. Jadi, mohon hati-hatilah bikin *statement* Pak tapi Pertamina minggu lalu kami ketemu dengan orang-orang Pertamina. Mereka merasakan dampak positif dari Baruna Jaya itu. Mereka dibantu ketika mereka mengadakan survei di bawah laut, ya jadi Bapak harus punya data yang cukup, jangan mengecilkan arti para peneliti, periset, perekayasa.

Kedua, Pak dengan anggaran yang terbatas ini, kegiatan riset ini difokuskan pada penelitian yang langsung memberikan dampak yang diharapkan oleh Pak Jokowi ya. Ada tema besar BRIN dan harus ketika sebenarnya saya selalu mengatakan BRIN sekarang melanggar undang-undang karena 100 pasal dari Undang-Undang Sistem Nasional Iptek, sekarang kalau saya balik nanya, siapa yang melaksanakan Pasal 48, sekarang BRIN melaksanakan 99 pasal yang berisi Litbangjirap. Jadi, kalau memang BRIN mau melakukan atau melaksanakan 99 pasal dalam Undang-Undang Sisnas Iptek fokus pada 99 pasal itu. Bapak harus melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan pengkajian dan penerapan termasuk perekayasa teknologi. Di luar yang terdengar dan juga saya merasakan itu LIPI ini yang berubah jadi BRIN, semua orang-orang LIPI itu ada di BRIN, orang LAPAN, orang BATAN itu semua ditinggalkan padahal BATAN dan LAPAN itu punya undang-undang sendiri. Ini Pak rapat terbuka Pak, bisa didengar oleh semua orang.

Nah, kenyataannya lagi Pak, misalnya contohnya apa bedanya kalau saya nanya Bapak bisa jelaskan sama saya nggak bedanya Bapak ini BRIN ini dengan Kemendikbudristek. Bapak selalu mengatakan akan menciptakan SDM unggul, itu bukan tugasnya BRIN, bukan, itu tugasnya Kementerian Dikbudristek. Tugasnya BRIN itu jelas adalah mengintegrasikan ya perencanaan, yang sekarang Bapak lakukan dalam mengintegrasikan lembaga. Padahal di dalam Undang-undang Sisnas Iptek, okelah itu kemauan politik kita nggak ngertilah tapi saya sebagai pembuat undang-undang tentunya sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, saya harus saling mengingatkan itulah tugas kami sebagai Anggota DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

Contohnya, saya mau nanya lagi nanti Bapak kembali rapat dengan stafnya, renungkan, apa bedanya BRIN dengan Kementerian Dikbudristek, contohnya talenta inovasi. Memang betul waktu ada Dikbudristek ada di sini, saya yang menggagas itu talenta inovasi. Tapi talenta inovasi itu sudah dilakukan sekarang oleh Kementerian Dikbudristek, ya Bapak bukan menciptakan SDM unggul, bukan. Kalau Bapak mau melaksanakan 99 pasal di dalam Undang-Undang Sisnas Iptek, Litbangjirap itu kata kunci di 99 pasal Undang-Undang Sisnas Iptek, bukan penelitian Pak. Saya mendapatkan data ya bahwa sekarang peneliti yang sekarang ini yang ada di BRIN dia yang usulin, nanti anggaran Bapak juga yang tentukan. Hati-hati Pak, itu pengawasan anggaran itu ya, nanti judulnya gimana mau mencapai. Kita berharap hilirisasi nanti ke depan, makanya dalam Undang-Undang Sisnas Iptek ada yang disebut dengan *audit and clearing technology* ya, sampai kita juga membuat etika para peneliti, perekayasa karena ada Litbangjirap 99 pasal itu Pak. Mohon maaf Pak, kalau saya baca Bapak di dalam hasil pelayanan publik yang dikeluarkan Komisi Ombudsman Bapak itu LIPI ada di zona kuning, ini datanya saya bisa kirim. LAPAN, BPPT, BATAN itu di layar ranking-nya di atas, LIPI itu di bawah menurut hasil Komisi Ombudsman tentang Pelayanan Publik. Jadi, kalau mengatakan peneliti 50 tahun nggak ada hasilnya jangan-jangan, mohon maaf ya teman-teman di LIPI. Tapi saya yakin kok semua temen-temen semua baik di LIPI, di BATAN, di LAPAN semua punya hasil tapi LIPI sendiri di bawah kepemimpinan Bapak itu ada di zona paling bawah, zona kuning itu dikeluarkan bukan oleh saya, oleh Komisi Ombudsman. Pelayanan publik LIPI di 2020 yang dikeluarkan di 2021.

Nah, contohnya lagi Pak, dengan adanya ini, jadi saya beberapa hari lalu ketemu dengan teman-teman di Bappenas. Semua orang Litbang Bappenas itu nangis sampai orang dari Litbang Bappenas itu foto sama Bu Andi mau saya kirimin tuh ke teman-teman peneliti yang lagi nangis di Litbang Bappenas. Nah, jadi Bapak, saya mau denger rancangan BRIN itu *grand design* ke depannya apa sih Pak saya belum pernah dengar, pencapaian visi Iptek Indonesia yang maju sesuai dengan visi Presiden Pak Jokowi itu seperti apa dan ini harus Bapak sampaikan ke seluruh *stakeholders* yang Bapak likuidasi itu. Kami tuh LIPI itu maunya ini, maaf BRIN, *grand design* kami ke depan, *grand design* itu ke mana arahnya. Saya minta Bapak menuliskan *grand design*-nya Pak Handoko. Pak Handoko ini saya sayang sama Pak Handoko, tapi saya akan keras selalu karena itu pertanggungjawaban saya di dunia dan di akhirat nanti karena saya ikut di sini membuat undang-undang itu ya.

Kemudian Pimpinan BRIN sangat miskin komunikasi, jangan Pak, kayak awal Pak Handoko bulan April sudah telepon, Pak jangan ulang Bapak di demo lagi seperti di LIPI, miskin komunikasi, saya nggak mau. Waktu itu saya telepon secara pribadi Pak Handoko ya, nah harus ada koordinasi ini dengan instansi yang dilebur dan jangan Bapak melebur Komnas HAM sudah protes karena Bapak ini ranahnya eksekutif. Litbang-nya DPR nggak bisa juga Pak, nggak bisa, beda, dia ranahnya legislasi, dia harus punya kemandirian. Ini akan menimbulkan demo yang luar biasa, teman-teman dari badan, di DPR ini sudah banyak menyampaikan sejak 1 tahun yang lalu, kami ranahnya ini adalah punya independensi memberikan *support* kepada Anggota DPR, nggak bisa kami di bawah BRIN. Komnas HAM juga sudah protes kan, ini Pak komunikasi.

Jadi, akhirnya kalau komunikasinya jelek, ketidakpercayaan terhadap BRIN ini sudah ada Pak di lembaga internasional. Saya sudah banyak ketemu dan Atase Pendidikan dari Jerman, dari negara-negara Eropa ketemu saya beberapa bulan yang lalu, mereka udah nggak *trust* lagi nanti sama BRIN. Ini serius loh Pak, saya nggak bohong.

Kemudian, saya juga ingin menanyakan ya nah pada Oktober 2021 terjadi kelangkaan solar di sejumlah wilayah Indonesia. Ini terjadi karena proses inspeksi kilang Pertamina yang seharusnya rutin dilakukan terlambat. Proses inspeksi ini untuk memastikan kilang dalam kondisi aman, biasanya memerlukan waktu 3 minggu. Nah, proses inspeksi kilang terhambat karena layanan di Balai Besar Teknologi kekuatan struktur di BPPT terkendala, ya setelah integrasi BPPT ke BRIN 1 September 2021. Selain proses bisnisnya jadi tak jelas, jadi belum ada kepastian mekanisme layanan inspeksi di balai setelah dialihkan ke BRIN. Ini fungsi Komisi VII juga ini karena Pertamina.

Kemudian program Kementerian ESDM untuk menggenjot pencapaian energi baru dan terbarukan lewat energi surya terhambat, bahkan terancam molor karena layanan uji SNI dan standar produk, seperti : modul, fotovoltaik, silikon kristalin di Balai Besar Teknologi Konversi Energi B2TKE tak bisa melayani saat ini, layanan publiknya menjadi jelek. Menurut Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik, Silikon Kristalin wajib SNI berlaku Januari 2022. Tapi layanan uji SNI di B2TKE nggak jalan saat ini, wajib SNI-nya menjadi tertunda, ini mengancam pencapaian bauran energi. Mengapa layanan di B2TKE tak jalan? Pertama, karena di bawah BRIN akan di bawah Deputi Infrastruktur, siapa Deputi Infrastrukturnya sedangkan SDM akan dibawah deputi lainnya. Ini bertentangan dengan ketentuan ya Komite Akreditasi Nasional dan Badan Standardisasi Nasional.

Kedua, untuk memberikan layanan balai memerlukan SDM yang cukup. Setelah integrasi ke BRIN dan karyawan non-PNS yang rata-rata teknis dan tenaga laboratorium diberhentikan di lembaga tadi di B2TKE. SDM yang ada saat ini tidak memungkinkan bisa memberikan pelayanan. Ketiga, mekanisme dan proses bisnis yang belum jelas dahulu ketika masih berbentuk balai unit ini bertindak sebagai satuan kerja Satker yang kompleks, yang lengkap untuk bisa memberikan layanan jasa ke industri. Misalnya, kepala balai sebagai kuasa pengguna anggaran setelah diintegrasikan ke BRIN. Kepala balai diubah menjadi kepala kantor yang tidak punya wewenang sebagai KPA. KPA-nya harus dilempar ke BRIN dan ini memperpanjang birokrasi. Berikutnya sejak diintegrasikan tarif pun belum ada aturan baru. Sebelum diintegrasikan tarif mengacu pada PP 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Nah, di sini ada Panja Penerimaan Negara di sini di Komisi VII. Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah diintegrasikan karena namanya insitusi berbeda karena namanya jadi BRIN, aturan ini tidak bisa digunakan lagi.

Setelah ada keluhan dari pengguna jasa baru pada 31 Desember terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif

atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, kebutuhan mendesak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi. Masalahnya ada masalah, jenis dan tarif ini tidak pernah didiskusikan dengan para pihak. Ini menjadi masalah karena ada beberapa layanan yang tarifnya naik, ini baru contoh Pak 2 balai ya.

Berikutnya laboratorium di berbagai balai mengantongi akreditasi untuk bisa melakukan pengujian. Akreditasi ini melekat pada institusi balai yang lama, setelah diintegrasikan dan berubah institusinya, akreditasi ini otomatis tidak bisa dipakai ketika menjadi institusi di BRIN untuk melayani pengujian dan menyelenggarakan jasa pengujian. Nah, yang harus berarti BRIN harus punya akreditasi baru dan ini perlu waktu dan mubazir. Nah, pelayanan industri dari pihak ketiga akan terhambat.

Ketiga, Pak ini lagi peleburan kelembagaan Iptek saat ini justru menyulitkan tugas koordinasi BRIN sesuai dengan Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek. Sejak awal Pimpinan BRIN tidak datang dengan konsep peleburan yang matang, *trial and error*, semua sekarang masih PLT, perekrutan tidak punya tempat dan penempatan SDM di pos-pos yang ada Kepala BRIN adalah keputusan Kepala BRIN sendiri. Pak Laksana Handoko sebagai Kepala BRIN ya memang telah mengeluarkan pedoman manajemen kinerja pegawai di lingkungan BRIN dan tentunya kita lihat, termasuk juga saya tadi tanyakan soal *open call*. *Open call* gitu loh, jadi *open call* kan padahal Bu Diah sudah mengatakan tidak bisa S2, S3 langsung menjadi peneliti utama, tapi kan kita harus ada yang bantu, asisten-asisten. Saya ketika pengalaman saya di LAN di laboratorium banyak asisten-asisten yang bantu menyiapkan berapa kecukupan, saya perlu misalnya saya perlu Hcl, saya perlu kalium permanganat misalnya ada yang bantu. Kemudian ketika saya mau mengukur kadar lemak, saya minta dia memvalidasi alatnya terlebih dahulu, itu contohnya.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Ibu Andi, sebentar saya perpanjang dulu waktunya ya. Kita perpanjang sampai 18.45 WIB ya, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bu Andi kalau bisa dipersingkat saja, biar temen yang lain bisa menanyakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Jadi, penguatan SDM ini talenta inovasi ini punya program Kemendikbudristek. Jadi, Bapak tolong renungkan Bapak ini BRIN, kalau memang sudah mau BRIN sekarang jangan menjadi menciptakan SDM unggul, ini programnya Kemendikbudristek. Nah, contohnya sektor lain Program *Male* ya kemudian *male* ini tadinya kan bisa kita produksi ya, tapi Bapak membelokkan menjadi *male* sipil dan misi kargo ya. Kemudian ada isu juga bahwa BRIN tidak akan melakukan riset teknologi pertahanan. Nah, siapa,

Litbangnya Pertahanan sudah pindah ke BRIN, siapa yang melakukan? Yang saya dengar Pak juga ya, Bapak ini juga BRIN ini ya *ngecer-ngecerlah*, penelitian sedikit-sedikit, sedikit-sedikit ah ini bisa jadi temuan nih mudah-mudahan KPK dengar ya, di-*ecer-ecer*, tidak jelas siapa yang melakukan, siapa yang mengawasi, siapa yang memastikan tujuan itu tercapai.

Sebenarnya masih banyak Pimpinan, tapi mengingat waktu ini penting sekali Pak Handoko karena ini sudah menjadi analisa publik. Saya katakan, orang mengatakan politisi bisa bohong, saya nggak tahu Bapak jadi politisi atau jadi cendekiawan, semua pihak tidak bisa bohong.

Demikian.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bu Andi Yuliani Paris.

Pak Mul di, sabar sebentar ya, kan pertanyaan hanya 5 menit tetapi kita tersisa 1 orang yang masih hadir secara fisik di sini yaitu Bu Ratna Juwita.

Kami persilakan Bu Ratna.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Mul harap bersabar ya Pak Mul, saya cuma sebentar.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, seluruh sahabat Komisi VII,
Yang kami banggakan Pak Kepala BRIN,
Pak Dirut Bio Farma beserta segenap jajarannya.

Terima kasih Pak atas pemaparannya. Banyak informasi yang kami terima namun banyak juga hal-hal yang tetap perlu kami konfirmasi supaya ini bisa lurus begitu beritanya.

Yang pertama, saya masih seputar Eijkman ya Pak terutama tentang vaksin Merah Putih, di sini saya kok ada *dispute* ya. Maksudnya kalau misalnya vaksin Merah Putih ini sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden, ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang berarti itu harus ada strategi percepatan supaya ini bisa segera berhasil begitu. Saya bilang berhasil ya dari sisi vaksinnya sendiri juga dari sisi pelaksanaan risetnya. Yang saya bingung di sini Pak, kalau misalnya ini sudah kejar-kejaran, setelah Eijkman itu

dibubarkan termasuk tim peneliti dari vaksin Merah Putih ini, lalu yang melanjutkan riset ini siapa Pak? Artinya kan harus jelas diambil alih oleh siapa, supaya kita juga bisa jelas ngejar tanggung jawabnya ini ke siapa Pak, itu yang pertama.

Yang berikutnya di halaman 3 tadi di pemaparan Bapak, ada 3 tahap integrasi yang dibutuhkan untuk memobilisasi SDM yang sebegitu banyak. Ada 5 entitas riset, ada 34 litbang dari kementerian atau lembaga dan ini jumlahnya juga tadi sudah dihitung malahan sama senior kami, Pak Karding ada sekitar 14.000 begitu. Peleburan kelembagaan yang terkait dengan iptek dan inovasi ini saya pikir Pak, sepertinya kok agak mempersulit BRIN ke depan ya gitu tapi semoga Pak Handoko sudah punya *roadmap plan* yang jelas terkait ini begitu karena kalau misalnya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, ini kan rentang koordinasi, rentang komunikasi yang dimiliki oleh BRIN ini terlalu lebar Pak. Jadi, mungkin kalau misalnya Pak Handoko tadi menyampaikan visi-misi BRIN itu sudah jelas ke depan, ini harus dijelaskan juga bagaimana supaya tujuan BRIN untuk mengefektifkan, untuk mengefisienkan dari semua lembaga riset ini tidak menjadi kendala birokrasi baru yang memperpanjang jumlah koordinasi yang harus dilewati oleh peneliti-peneliti itu sampai bisa menghasilkan sesuatu produk, temuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Yang berikutnya di halaman 8, Pak. Saya menyambung yang disampaikan oleh Ibu Andi bahwa Bapak menjelaskan kepada kami ada *open call* rekrutmen untuk mengisi posisi-posisi tertentu begitu. Nah, saya kok mikirnya begini ya berarti kebalik ini, berarti ini setelah kejadian baru diobati gitu sakitnya, kenapa sebelum ada *open call* itu tidak ada sosialisasi ke dalam dulu yang baik begitu loh sebagai upaya untuk memitigasi resiko sosial Pak yang muncul akibat adanya peleburan-peleburan ini. Kita tahu ya minggu kemarin salah satu sahabat kami Bu Diah sudah menjelaskan sedemikian dahsyatnya dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya pembubaran PT Dirgantara dan lain-lain itu. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam BRIN juga Pak karena kita harus mengingat bahwa mereka semuanya itu gerbong, gerbong yang sangat besar. Jadi, saya harap sosialisasi ke dalam, pendekatan itulah yang harus lebih digencarkan lagi oleh Bapak Kepala BRIN beserta timnya yang saya yakin Bapak-bapak ini adalah orang yang secara intelektual diberikan kelebihan. Namun saya harap secara nurani dan perasaan Bapak juga punya kelebihan begitu, harus ada lebih empati di sini.

Yang berikutnya, saya ingin menanyakan kepada Pak Dirut Bio Farma. Pak, saya ingin izin interaktif Pimpinan. Tadi yang sudah didaftarkan ke WHO itu vaksin BUMN apa vaksin Merah Putih, Pak?.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Yang kita daftarkan yang BUMN Ibu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Oke.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Bisa saya lanjutkan, Bu?

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Tidak, saya hanya butuh itu saja.

Jadi, begini Pimpinan, melalui rapat ini kita bisa memiliki kesimpulan tersendiri sejauhmana komitmen dari pemerintah untuk membuat vaksin Merah Putih itu berhasil. Saya ingin dimasukkan ke dalam kesimpulan bahwa kita Komisi VII disini dari awal terus memiliki komitmen supaya vaksin Merah Putih ini segera dilaksanakan, diselesaikan begitu Pimpinan.

Yang selanjutnya saya juga izin konfirmasi Pimpinan kepada Dirut Bio Farma. Pak berarti kemarin waktu vaksin Merah Putih ini masih dipegang oleh Eijkman, kami diberikan *deadline* kapan akan selesai. Kira-kira kalau saat ini saya menanyakan kepada Bapak kapan vaksin Merah Putih ini akan selesai bisa dijawab tidak Pak?.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Perkiraan kami dengan proses yang ada sekarang Ibu itu kemungkinan Q4 2022.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Kuartal IV 2022, oke terima kasih Pak, paling tidak saya bisa lega karena ada *deadline* untuk bisa selesai.

Mungkin itu saja Pimpinan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Terima kasih Pak Mul, kami akhiri.

*Wallahulmuafiq Ila Aqwamit Thoriq.
Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berikut kami persilakan Pak Mul, nanti dilanjutkan Pak Kardaya.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik. Pimpinan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dengan aturan baru ternyata virtual terakhir ya. Baik.

Yang kami hormati kami banggakan Kepala BRIN,
Pak Dirut Bio Farma, dan
Teman-teman sekalian yang hadir.

Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan Vaksin Merah Putih. Terus terang Pak, 2 strategi yang dikembangkan pemerintah, strategi yang pertama jangka pendek, *oke*lah apa boleh buat, saya setuju. Tapi ketika jangka menengah terus terang saya nggak sepakat dengan pemerintah, ya tapi ini kan haknya pemerintah. Namun, saya melihat konstitusional untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami tidak sepakat dengan strategi itu. Di mana istilahnya menggandengkan antara Vaksin Merah Putih dengan vaksin BUMN, otomatis pikiran terpecah, sumber daya terpecah, konsentrasi terpecah karena ketika ditanyakan yang didatangkan di mana muka WHO, dia ngurusin BUMN.

Oleh karenanya, dengan ini sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada pemerintah agar pemerintah konsisten, jangan menganaktirikan vaksin Merah Putih yang ada di Bio Farma. Jadi, itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, sampai nanti vaksin Merah Putih-nya nggak jadi di kuartal ke IV 2022.

Lalu terkait vaksin Merah Putih dengan Eijkman ini kemarin kita sudah RDPU, hadir Profesor Amin, Profesor Hera, Profesor David, Profesor Safarina Golfiani Malik, saya hafal semua orang-orang itu karena sudah lama kita bekerja sama. Kita menanyakan dengan detil Bapak dan Ibu-ibu di Eijkman, Bapak Profesor di Eijkman ini, apakah peleburan LBR Eijkman ke BRIN akan mengganggu atau tidak pengembangan vaksin Merah Putih. Apa jawabnya? Jawabnya adalah mengganggu, berbagai paparan teoritis dari Kepala BRIN sebenarnya *oke-oke* saja, baik-baik saja, tapi di lapangan itu ternyata tidak, karena apa, mengembangkan proses vaksin ini penuh resiko, perlu proses isolatif. Karenanya eksistensi kelembagaan Eijkman itu *..(suara tidak jelas)..* karena pengembangan riset vaksin ini, Bio Farma kan bolak-balik ke sana bahkan menambah orang di Bio Farma, ya kan kita sudah datang ke Bio Farma, kita lihat bagaimana yang terjadi di sana. Jadi, ini yang terkait dengan Eijkman jelas mengganggu, oleh karenanya saya ingin berharap, minta agar Eijkman sebagai kelembagaan ini bisa meneruskan program pengembangan riset vaksin ini.

Yang kedua terkait dengan BRIN, apa yang disampaikan Pak Karding tentang SDM, apa yang disampaikan oleh Bu Andi tentang kelembagaan. Saya menerima masukan pengaduan, baik dari SDM Kementerian ESDM, dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Pertanian, dari sisi aspek SDM. Sekarang ini di lapangan itu teori memang indah, di lapangan itu SDM-nya dipindahkan ke balai-balai, yang muda-muda dilarikan ke balai, yang menjelang pensiun yang dikirim ke BRIN prakteknya, terganggu itu Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian itu sudah berdialog dengan mereka Komisi VII, praktek di lapangan. Seperti dikatakan Pak Karding terjadi, jadi ini tidak

semudah itu kondisi di lapangan, ini akan berlarut-larut, ya Bu Diah juga sudah mengatakan itu. Ini mohon perhatian betul, kalau nggak bisa *collapse*.

Yang kemudian ini tadi siang saja baru terjadi RDP antara Kementerian Pertanian dan Komisi IV. Pak Menteri menyatakan minta kepada Komisi IV agar Balitbang-nya ini direlaksasi, tidak dilebur ke BRIN, sudah menjadi keputusan rapat tadi siang. Saya mendapat informasi seperti itu.

Terkait kelembagaan ini yang ditekankan oleh Bu Andi ternyata di lapangan juga tidak semulus itu. Awalnya organisasi yang dibentuk di dalam BRIN adalah OPL (Organisasi Pelaksana Litbangjirap). Namun, dalam perjalanannya menyempit menjadi sekedar organisasi rius, anda jangan heran teman-teman BPPT bertanya, di mana fungsi perekayasaan. litbangjirap tinggal di ..(*suara tidak jelas*)..tadi Bu Andi mengatakan itu, saya pun ..(*suara tidak jelas*..) bagaimana nasib perekayasaan, bagaimana nasib BPPT, ini persoalan tupoksi.

Kemudian terkait ketenaganukliran segala fungsi di luar riset banyak yang dipotong termasuk unit-unit di daerah dipotong karena nggak ada yang riset dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, dari awal saya sudah secara pribadi, secara kepartaian kami menolak peleburan Badan Tenaga Nuklir, Lembaga Antariksa LAPAN ke dalam BRIN karena apa, itu melanggar Undang-Undang Ketenaganukliran dan Undang-Undang Keantariksaan, pemerintah terlalu memaksakan diri kalau terus begini, ..(*suara tidak jelas*)..jadi akan banyak masalah. Jadi, karenanya kami ingin sebuah relaksasi, ini keputusan di Komisi IV minta relaksasi itu, jadi kalau kemarin Pak Sugeng minta dibentuk pansus, ya saya setuju dengan Pak Ketua. Dibentuk Pansus BRIN ini agar selesai urusan SDM dan urusan kelembagaan.

Saya rasa 2 hal itu, Pimpinan. Saya mohon maaf kalau berkepanjangan.

Demikian.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Mul.

Kami lanjut ke Pak Kardaya, kami persilakan Pak.

F-GERINDRA (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan semua Anggota Komisi VII yang hadir maupun yang secara *virtual* mengikuti rapat ini,

Ketua atau Kepala BRIN beserta jajaran, lalu dari Bio Farma dan yang lainnya yang hadir.

Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai BRIN. Setelah rame-rame terjadi kegaduhan di luar mengenai BRIN, saya mencari tahu bagaimana sih awalnya ini *asbabun nuzul*-nya mengenai BRIN, apa sih ininya pikiran-pikiran yang sehingga ingin membentuk BRIN. Disampaikan oleh mereka-mereka, saya dari berbagai baik di LIPI maupun di anggota-anggota DPR yang dulu terlibat dan disampaikan bahwa BRIN ini diharapkan menjadi solusi dari riset-riset dan pengembangan teknologi yang ada di Indonesia. Di situ jelas awalnya BRIN itu sebagai koordinator agar riset-riset yang terjadi itu efektif. Apa artinya koordinator? Mengkoordinir jangan ada tumpang tindih dan juga disebutkan bahwa BRIN ini bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga riset itu. Tetapi yang terjadi adalah BRIN bukan sebagai koordinator, ngamuk BRIN, lalu ini dilebur, ini dibubarin, ini dibentuk baru. Jadi, tujuan sebagai koordinatornya hilang.

Yang kedua, efektifnya, efektifnya tidak efektif karena dari pelayanan-pelayanan yang terjadi sampai saat ini sekarang itu banyak yang berhenti, banyak yang tidak jalan. Tadi disebutkan Baruna bahwa begini katakanlah tidak baik ini, saya katakan saya dari tahu betul dari sektor energi dan sumber daya mineral sangat membantu Baruna itu. Tidak banyak kita mempunyai kapal yang bisa berfungsi seperti Baruna. Nah, itu dan mengenai BRIN ini juga tenaga-tenaga yang ada di lembaga-lembaga penelitian, maupun Kemristek itu sekarang itu sudah apatis, sudah katakanlah udah *hopeless* gitu.

Jadi, kesimpulan saya yang kita harapkan BRIN itu menjadi solusi, hasilnya BRIN itu menjadi masalah itu, sehingga saya sih berharap sebagai anggota komisi dan sebagai wakil rakyat mempunyai hak konstitusional. Saya meminta pertama, *me-review* kembali keberadaan BRIN apakah sesuai dengan yang kita harapkan bukan masalah ini-ini, tetapi secara yang besarnya, garis besarnya secara, BRIN itu apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu sekaligus pembentukan pansus mengenai penilaian kembali keberadaan BRIN itu sangat perlu dan segera dilaksanakan. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, terkait dengan vaksin Merah Putih, saya sedih, sedihnya apa? Dalam presentasi yang hari ini cenderung bahwa vaksin Merah Putih itu bukan gagal, tetapi mempunyai banyak kelemahan, banyak ini sangat ditonjolkan vaksin dari BUMN. Vaksin Merah Putih ini kan objektif daripada pimpinan negara, objektif dari kita semua untuk, kalau ada kelemahan kenapa nggak dibantu itu, begitu ini wah itu lemah itu bikin lagi yang lain. Itu namanya cuma membuat susah aja, membuat kita sedih. Jadi, untuk ini saya mengharapkan dibalik apa pun yang terjadi itu kita harus dorong vaksin Merah Putih dan dengan vaksin Merah Putih itu kita lebih bangga gitu dan nanti kalau vaksin dari BUMN ini akan dibuat atas nama vaksin Merah Putih karena vaksin Merah Putih itu adalah objektif dari negara, BUMN itu apa sih, N-nya itu negara, milik negara. Jadi, harus mendukung apa yang disampaikan atau diobjektifkan oleh negara.

Jadi, sekali lagi Pimpinan 2 hal ini, pertama, pansus karena kita perlu me-review keberadaannya BRIN yang awalnya diharapkan sebagai solusi tetapi ternyata menjadi masalah. Yang kedua mengenai eksistensi daripada vaksin Merah Putih.

Saya kira Pimpinan dan Bapak, Ibu yang hadir, baik fisik maupun *virtual* saya cukupkan, saya akhiri.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamit Thoriq.
Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Kardaya.

Berikut ada Pak Willy Yoseph yang hadir juga secara *online*, kami persilakan Pak Willy.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang kami hormati dan kami banggakan tetap semangat walaupun sudah sore dan juga teman-teman anggota yang lain dan seluruh mitra, baik itu BRIN maupun Bio Farma dan yang lain-lainnya yang hadir di acara ini.

Saya menyimak dari apa yang telah disampaikan teman-teman kepada Kepala BRIN itu sangat luar biasa, artinya juga sepakat kan sudah ada satu keinginan untuk pansus. Menurut saya ini maksudnya pansus ini tentu untuk mencari akar permasalahan dan juga mencari solusi seperti apa yang menjadi keinginan negara dengan lembaga ini. Kita tahu bahwa kehadiran lembaga ini tidak lepas dari keinginan rohnya itu adalah keinginan untuk memperbaiki bangsa ini menjadi periset-periset yang lebih bagus dengan produk-produk yang lebih bagus, Indonesia yang saat ini kita masih belum punya produk yang bisa kita banggakan kayak Korea, kayak Jepang, kayak negara lain ya. Jadi, tidak ada yang identik begitu sebut Indonesia. Maka untuk itulah mungkin menjadi satu pertimbangan Pak Presiden dan semua pemimpin kita agar BRIN menjadi suatu lembaga yang kuat, yang mengkoordinir semua inovasi, riset dan kemajuan teknologi Indonesia termasuk juga tentang kesehatan, pertanian dan ekonomi ya.

Nah, saya ingin mengingatkan saja bahwa apa yang telah menjadi sampain dari teman-teman tadi sangat masuk akal. Oleh karena itu, ya mungkin Kepala BRIN, artinya dengan segala kerendahan hati karena bagaimanapun kami tahu Bapak-bapak juga baru menjabat sebagai Kepala BRIN ini tentu juga punya banyak kelemahan, kekurangan sesama, sesama kita juga sama. Tetapi untuk penyempurnaan ini tentu tidak boleh kita biarkan, mari kita duduk bersama membukanya lebar-lebar supaya apa yang menjadi

kelemahan karena ada banyak sekali undang-undang yang juga ditabrak gitu, untuk kita memposisikan BRIN ini menjadi satunya koordinator ya mungkin seperti itulah untuk periset kita.

Nah, maka untuk itu paling bagusnya Kepala BRIN ini mempersiapkan, satu *database* tentang sebelum bergabungnya, artinya LIPI, mungkin Eijkman dan lain-lain dileburkan dan sebagainya itu ya tentu harus ada *database*. Mereka itu posisi bagaimana, ya mungkin orangnya, asetnya, programnya, kemudian begitu dileburkan tadi kan kita harapkan agar menjadi lebih bagus. Nah, kemudian dasar peleburannya ini undang-undang mereka apakah juga ikut dileburkan dalam satu Undang-Undang BRIN atau Keppres ya supaya nanti kita perbaiki semua. Nah, maka untuk itu saya melihat bahwa BRIN ini perlu segera berkoordinasi dengan semua pihak dan saya tadi juga ikut menyimak apa yang disampaikan Ibu Andi. Saya *ngeh* juga gitu bahwa BRIN ini harus punya *cluster-cluster* tertentu yang bisa bergabung dengan BRIN. Karena, ada beberapa lembaga juga yang menurut saya peneliti dan sebagainya itu nggak bisa karena ekspektasinya itu beda. Apakah itu punya militer, apakah punya DPR gitu ya dan lain-lain. Sehingga kalau nanti pada rezim atau pada klaster ke depannya. Memang harus juga digabung ya artinya mungkin yang terakhir setelah yang ada ini punya kekuatan ya, punya kemampuan, sudah *settle* di situ. Jadi, bisa dibuat seperti itu.

Nah, saya hanya memberikan saran saja kepada Pimpinan dan juga kepada kita semua agar benar harus dibuat pansus agar ini terang-benderang dan kita membantu pansus ini kan sifatnya membantu untuk meluruskan jangan sampai kebablasan karena kita tahu banyak sekali asset, banyak sekali anggaran yang mau dikucurkan ke sana kalau digabungkan. Dan juga ada orang yang artinya juga tidak cocok di sana bergabung karena memang mereka, misalnya saya katakan tadi spesialisasinya beda dengan apa yang menjadi harapan kita di BRIN itu.

Nah, untuk itu sekali lagi kami meminta agar BRIN juga diberikan waktu sesegera mungkin menyampaikan progresnya tentang apa namanya tentang penggabungan ini, kemudian strukturnya, lalu cerita lamanya mereka yang bergabung itu apakah mereka juga mendapat porsi yang sama, artinya yang tadi kan dikatakan mereka banyak juga dilarikan ke mungkin ke badan-badan yang sangat rendah sekali gitu. Sementara, mereka ini peneliti yang cukup professional.

Mungkin itu saja tanggapan saya.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Willy.

Dan demikian seluruh anggota yang hadir baik fisik maupun virtual telah menyampaikan masukan dan pandangannya, serta pertanyaan-pertanyaan.

Saya tawarkan begini kepada Bapak/Ibu sekalian karena sudah waktu maghrib sudah masuk. Jadi, saya tawarkan kita ini dulu, skors dulu ya sampai dengan pukul, ini kan hampir 18.40 WIB jadi sampai dengan pukul 7. Setelah itu kita kembali lagi untuk kita lanjutkan.

Jadi, saya skors dan setelah itu kita lanjutkan lagi rapat mulai jam 7 sampai 7.30 mudah-mudahan sudah selesai, saya skors ya? Baik.

**(RAPAT DISKORS PUKUL)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ibu/Bapak, kita bisa lanjutkan ya.
Baik, Pak Kepala, Pak Dirut, sudah ya.
Baik, skors saya cabut dan kita tambah waktunya 30 menit sampai 19.45 WIB.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 19.00 WIB)**

Terima kasih Ibu/Bapak.

Kita kembali lagi melanjutkan RDP kita dan dipersilakan untuk Kepala BRIN dilanjutkan Dirut Bio Farma untuk memberikan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh para anggota.

Silakan Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Kami akan merespon beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota Komisi VII.

Jadi, yang pertama adalah, mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan secara global dulu. Jadi, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kami tetap mendukung vaksin Merah Putih dan justru fokus kami ke arah itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kami fokus mengerahkan semua sumber daya, khususnya untuk menyediakan infrastruktur yang memang diperlukan, 2 infrastruktur utama yang memang sangat krusial untuk proses sampai uji, uji baik uji praklinis maupun uji klinis.

Kemudian yang kedua, terkait dengan proses integrasi. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa proses integrasi ini pada prinsipnya itu bukan BRIN mengambil-ambil sumber daya dari K/L lain, tidak seperti itu. Tetapi untuk program itu yang melakukan adalah Bappenas. Jadi, pada prinsipnya BRIN itu menerima kalau program itu dari Bappenas, kalau anggaran itu dari DJA, sekarang itu yang kami sudah menunggu dari DJA. Kemudian untuk SDM itu dari Menpan RB, tetapi dari proses itu kami akan menunggu surat dari masing-masing K/L. Jadi bukan kami yang mengambil-ambil tetapi seperti tadi

disampaikan oleh Pak Karding dan juga Pak Mulyanto seingat saya, itu memang untuk ada beberapa K/L memang yang tidak berkenan menyerah, mengalihkan SDM-nya. Jadi, ada yang sama sekali tidak mengalihkan, seperti Komnas HAM misalnya atau Kemenperin, eh mohon maaf BMKG, ada yang mengalihkan hanya yang akan mendekati pensiun misalnya.

Nah, untuk kasus seperti itu kami.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Pimpinan, interupsi sedikit.

Pak Kepala, ini jadi vaksin Merah Putih ini belum jalan juga.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Saat ini masih berproses Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Apanya lagi.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Ya, sekarang sedang berproses riset, kita masih baru akan masuk ke.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Kita bubarin aja ini BRIN Pak, kalau nggak selesai-selesai, apalagi. Anda kasih waktu kapan gitu loh, ini masyarakat nunggu kan Ketua. Kapan kira-kira Pak, ini interaktif, kita ini.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya tadi sudah disampaikan oleh Pak Honesty untuk vaksin Merah Putih yang *platform* protein rekombinan yang dari Eijkman itu akhir tahun ini.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Akhir tahun lagi? Terus mau dagang vaksin dari Cina lagi kita, bagaimana? Ini jadi dagangan jadinya Pak. Kita tanya kepastiannya kapan, apalagi kendalanya gitu.

Izin Pimpinan.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Tadi sudah saya jelaskan Bapak, jadi memang kita belum memiliki infrastruktur untuk melakukan uji dan melakukan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Orang kita beli vaksin aja punya uangnya, masa bangun infrastrukturnya nggak ada uang gimana Bapak. Kita kasih BRIN aja atau nggak anggaran BRIN 6 triliun ini kasih untuk bangun vaksin aja, iya ini banyak dibutuhkan masyarakat gitu loh. Coba Bapak gimana kalau ini nggak juga nggak selesai gimana, kan harus selesai Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, jadi kami semua menginginkan itu selesai Bapak, pasti dan perisetnya apalagi...*(suara tidak jelas)*

F-PD (MUHAMMAD NASIR, SH.):

Kalau nggak kita bentuk panja aja, panja mendalami regulasi penggunaan anggaran yang digunakan oleh BRIN ini maupun Bio Farma ini. Nanti kita rapat gabungan aja dengan Komisi IX juga, ya kalau nggak pansus bisa juga membuat 4 komisi yang berkompeten, Keuangan, Komisi IX, Komisi VII dan Komisi Hukum, Hukum Bu Komisi III. Jadi, kalau nanti ada yang menyimpang dari anggaran ini kita masukkan aja, menurut saya begitu Pimpinan.

Jadi, kita usulkan aja pansusnya, kita dalam ini dalam kesimpulan supaya *clear* gitu, kalau nggak tahu nanti, nanti akhir tahun, akhir tahun depan lagi. Kita kan sekarang butuh ini sekarang masalahnya, Bapak impor bisa vaksin ya kan Bio Farma ini kan. Menurut saya itu Pimpinan. Jadi, kita masukkan saja dalam kesimpulan, kita minta nanti dibentuk pansus antara Komisi VII, Komisi IX, Komisi XI, Komisi Hukum. Jadi, nanti kalau ada yang menyimpang dari proses hukum ini karena kita melihat kan regulasi ini dibutuhkan masyarakat. Kita di sini kan tujuannya buat masyarakat ini.

Mungkin itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Demikian yang disampaikan oleh Pak Nasir.

Kami persilakan Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Mohon izin melanjutkan.

Jadi, tadi seperti telah saya sampaikan, jadi sebentar tadi. Ya, jadi proses integrasi ini, jadi kami memang menunggu surat dari masing-masing K/L untuk pengalihan SDM dan untuk anggaran dari DJA dan program itu dari

Bappenas. Dan program dari Bappenas sudah kami terima semua, sedangkan untuk SDM juga sudah kami terima semua, tinggal ada 2 K/L yang belum. Dan tadi seperti disampaikan sudah diingatkan oleh Pak Mulyanto juga bagaimana apabila hanya yang mau pensiun saja yang diserahkan. Untuk kasus seperti itu kami sudah menyampaikan ke Bapak, Ibu Pimpinan kementerian lembaga bahwa kami tidak bisa menerima.

Jadi, secara umum biasanya kementerian, lembaga itu menyampaikan ke civitas di internalnya dan kemudian mereka membuka opsi. Jadi, membuka opsi dan setiap civitas periset yang ada di K/L-nya itu membuat surat pernyataan di atas materai, apakah mereka akan tetap di kementeriannya ataukah pindah ke BRIN. Dan yang menyatakan pindah ke BRIN itulah yang saat ini sudah kami proses. Demikian terkait dengan SDM periset.

Kemudian untuk terkait dengan infrastruktur dan banyak tadi contoh-contoh yang diberikan oleh Ibu Andi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan akhir tahun 2021 seluruh entitas DIPA itu masih seperti sebelumnya. Jadi, masih dipegang oleh apa masing-masing KPA sebelumnya. Jadi, belum ada di BRIN gitu. Nah, tetapi memang dalam proses karena DIPA-nya ada DIPA BATAN, ada DIPA LAPAN dan seterusnya. Jadi, kami baru melakukan *switch* manajemen itu pada tanggal 1 Januari ini.

Nah, kemudian terkait dengan berbagai infrastruktur tadi. Jadi, perlu saya sampaikan misalnya seperti yang diberikan oleh Bu Andi.

INTERUPSI F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Interupsi Pimpinan, sedikit.

Itu Bapak bilang tadi *switch* itu anggarannya yang lolos apa, ke badan-badan lain atau apa Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Ya kalau sekarang BRIN, mulai 1 Januari.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Berarti udah di Bapak?.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya saat ini.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Terus programnya dari mana.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Programnya yang pada saat itu sudah diputuskan di Komisi VII, di APBN.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Terus bagaimana penyesuaiannya nanti untuk apa udah sesuai dengan program yang mereka buat.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya karena kan kita meng-*carry over* pada saat itu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya kan yang diambil kebijakan Komisi VII kan hanya beberapa poin saja, tapi kan rincian detailnya kan belum ada.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Anggaran kami masih tetap 6,1 triliun sampai saat ini, belum ada tambahan dari kementerian lembaga yang lain.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, maksud saya rencana kerja yang Bapak mau kelola itu, Januari itu kegiatannya apa aja mana.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Itu sudah ada, waktu itu yang diputuskan sebelum pembahasan APBN.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya tapi kan rinciannya belum jelas Pak, itu Bapak setuju atau ikut mereka.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Enggak, sudah di kami pada saat itu, karena kami pada saat itu yang berdiskusi dengan Komisi VII, Bapak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Coba minta waktu Pimpinan, nanti kita minta datanya di-*print out* kan tiap-tiap badan penggunaan anggarannya buat apa saja.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kalau yang badan sebelumnya itu masih sebelum kami Bapak, yang tahun 2021.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya lah, tapi kan persetujuan penggunaan anggaran kan Bapak nanti kan atau mereka.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Mereka, masih mereka.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

2022 ini?.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kalau yang 2022 ini sudah saya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, yang 2022 yang saya maksud, 2022 berarti kan Bapak. Apa yang akan dilakukan apa melihat usulan dari mereka?

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Antara lain begitu, betul.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Atau Bapak yang buat.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Nggak, antara lain karena kita..*(suara tidak jelas)*..

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Maksud saya jujur di sini, jadi biar *clear*, jangan nanti Bapak kena demo 2 kali lagi. Ini saya minta ini yang 2022, Bapak yang mengusulkan atau mereka?.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kalau yang mengusulkan harus kami Bapak karena sudah anggaran BRIN.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Berarti Bapak yang menyusun.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, kami yang harus menyusun, betul.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Berarti mereka mengusulkan.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, betul.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Berarti keputusannya ada di Bapak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Jadi Pimpinan minta, kita minta kalau bisa rinciannya Pak. Rincian yang Bapak buat, kami ingin nanti ini di-panja-kan aja, menjadi Panja Hilirisasi supaya kita bisa memantau regulasi dari anggaran tersebut. Nanti bunyinya panja apa mungkin dibantu teman-teman yang lain.

Terima kasih, Pimpinan.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Ya, mohon izin Bapak Pimpinan.

Jadi, untuk melanjutkan, ya memang jadi seperti tadi yang sudah disebutkan. Jadi, ada beberapa contoh yang disebutkan oleh, khususnya oleh Ibu Andi tadi. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa yang disebut dengan riset itu adalah litbangjirap. Jadi, riset itu litbangjirap karena sesuai dengan bunyi regulasinya. Jadi, kami itu melakukan litbangjirap yang menghasilkan invensi dan inovasi. Jadi, bukan litbang itu riset dan jirap itu inovasi tidak seperti itu. Jadi, itu sebabnya semua unit-unit yang pelaksana itu pelaksana litbangjirap itu namanya unit riset, baik itu organisasi riset maupun pusat riset. Nah, bagaimana membawa hasil riset itu, hasil invensi dari riset itu bisa menjadi inovasi, itu yang menjadi tugas para deputi, termasuk misalnya Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Mereka yang akan memfasilitasi teman-teman periset untuk bisa membawa invensi yang dihasilkan dari proses riset itu ke inovasi, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, jadi memang pada saat perubahan ke BRIN memang perubahan terbesar yang terjadi itu adalah kami mengubah manajemen internal. Mengapa manajemen internal itu perlu diubah? Karena sebenarnya itulah problem mendasar kita selama ini.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin, Pimpinan.

Pak Handoko jawab saja apa yang menggantikan fungsi yang tadi saya contohkan ya, yang misalnya Pertamina dengan 2 PKS-nya, kemudian layanan yang lainnya, 2 lembaga. Itu 2 contoh saja yang kasih tadi. Itu konkritnya bagaimana.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Baik ya. Jadi, seluruh aktivitas riset itu ada di organisasi riset dan pusat riset. Sedangkan untuk layanan, layanan uji, pelayanan karakterisasi termasuk untuk pengelolaan kapal riset itu ada di deputi, dan SDM yang melakukan menjadi operator dari alat, menjadi operator apa atau yang melakukan layanan itu, itu juga menjadi SDM di deputi, Deputi Infrastruktur begitu Ibu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan, udah ada regulasinya nggak Pak, harus sudah ada dasar hukumnya loh.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Sudah ada Ibu, karena kami sudah ada OTK-nya. Jadi organisasi dan tata kelola BRIN itu, seperti itu sehingga yang periset dan organisasi riset dan pusat riset itu hanya fokus melakukan riset saja. Sehingga, mereka tidak dibebani dengan tugas-tugas layanan seperti sebelumnya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan izin.

Kalau nanti seperti yang disarankan tadi ada pansus. Pansus itu lintas komisi ya hukum atau panja nanti, ini termasuk karena mitra kita Kementerian Perindustrian, Pertamina ini mitra-mitra kerja kita yang mengalami masalah dengan dileburnya layanan-layanan yang saya contohkan tadi ke dalam BRIN. Di sisi BRIN sekarang nggak siap, sehingga ada kekosongan sekarang ini. Jadi, kami minta waktunya cepat jangan sampai Pertamina juga sudah mengeluh misalnya, satu contoh.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Jadi, boleh saya lanjutkan Bu, menjawab itu contoh yang Ibu berikan. Jadi, kasus untuk kelangkaan solar pada saat itu, itu terjadi karena kebakaran

kilang. Jadi, karena kebakaran kilang dan kemudian pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan kilang pasca kebakaran yang sudah dilakukan sesuai permintaan dan jadwal dari Pertamina. Jadi menurut kami tidak benar ada informasi bahwa itu terlambat, terhambat karena ketiadaan layanan dari kami karena itu terjadi akibat kebakaran kilang yang kemudian kilang tersebut dilakukan uji dan sebagainya, pemeriksaan itu oleh tim dari balai kami.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin, Pak.

Kalau kami memanggil Pertamina soal keterlambatan solar itu tidak ada kaitannya dengan kebakaran kilang loh Pak. Ini di *youtube* ya didengar nanti harus hati-hati Pak. Itu masalahnya bukan di kebakaran kilang karena Bu Nike berapa kali kita panggil setiap kali ada kebakaran, tidak ada Bu, yang terbakar itu bukan di kilangnya, bukan di kilangnya. Jadi, tidak mengganggu distribusi solar. Justru masalahnya itu ada kekosongan hukum ketika pindah dan tidak cepat BRIN menyiapkan, hati-hati Pak, bukan karena kebakaran kilang, bukan kilang yang terbakar ini berapa kali Bu Nike kami panggil di sini. Walaupun berita di koran-korannya kebakaran kilang tapi bukan kebakaran kilang dan tidak mengganggu.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Ya, baik.

Perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kita tidak ada jeda Bu, tidak ada jeda karena kita sudah berkoordinasi juga dengan KAN bahwa tadi yang Ibu sampaikan terkait kekosongan ya akreditasi maupun sertifikasi itu tidak terjadi karena KAN itu memberikan kelonggaran bahwa kita bisa tetap melanjutkan memakai sertifikasi dan akreditasi yang sudah ada dengan struktur baru yang ada, sembari nanti kita melakukan penyesuaian setelahnya.

Dan untuk itu saya sebenarnya sudah bertemu langsung sejak bulan Mei karena kita sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi, ini tidak hanya yang ada di BPPT tapi juga di semua lab yang ada di LIPI dan sebagainya juga sama kondisinya gitu. Apalagi yang terkait dengan nuklir yang ada di BATAN. Jadi, kami sudah mengantisipasi hal tersebut bahwa seluruhnya masih tetap berlaku. Dan itu sebabnya pada saat integrasi tanggal 1 September karena sesuai OTK yang baru memang sudah tidak ada balai di semua LPNK. Sehingga, kami membuat atas persetujuan Menpan RB yang namanya kepala kantor dan kepala kantor itu tetap dapat berfungsi sebagai penanda tangan dari dokumen yang dikeluarkan untuk proses, apa ini, hasil uji dan sebagainya. Sehingga, tidak ada, tidak terjadi kekosongan terkait manajemen untuk akreditasi, sertifikasi dan uji yang selama ini menjadi layanan kami.

Kemudian untuk layanan uji solar panel itu juga tetap berjalan. Jadi, ini bisa dilihat di mana di Puspiptek itu tetap jalan dan seluruh SDM itu sekali lagi perlu saya sampaikan itu berada langsung di bawah, memang tidak di balai,

tidak di pusat riset tapi dibawah Deputi Infrastruktur yang mengelola seluruh infrastruktur tersebut.

Kemudian yang terkait dengan apa kepercayaan lembaga internasional. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa sejauh ini yang sudah berdiskusi dengan kami justru saat ini semakin banyak lembaga internasional yang ingin bekerja sama dengan BRIN, karena apa? Karena BRIN saat ini mampu melakukan *cofounding*. Jadi, tidak semata-mata semuanya berasal dari sumber pendanaan mereka.

Kemudian juga, nah ini terkait perbedaan BRIN dengan Kemendikbudristek. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa itu sebabnya mengapa dilakukan perubahan Perpres untuk BRIN dan Kemristek. Kemristek itu dari Perpres 31 menjadi Perpres 62 dan BRIN itu dari Perpres 33 menjadi Perpres 78 Tahun 2021 itu justru untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antara Kemdikbudristek dan BRIN. Jadi, di dalam perpres tersebut sudah jelas bahwa Kemdikbudristek hanya mengelola riset terkait dengan aktivitas iptek di kampus, jadi tidak di luar itu. Sedangkan BRIN itu tetap bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan riset dan inovasi secara nasional dan juga mengatur aktivitas riset dan inovasi secara nasional, termasuk prioritas riset nasional dan sebagainya yang harus diikuti oleh Kemdikbudristek juga.

Sehingga nah perlu saya sampaikan di sini, saya luruskan lagi bahwa program manajemen talenta nasional untuk bidang riset dan inovasi itu memang diberikan tanggung jawabnya kepada BRIN sesuai dengan Perpres. Sedangkan di Kemdikbudristek itu mereka mengelola manajemen talenta nasional untuk seni dan budaya. Sedangkan, Kemenpora itu untuk olahraga. Nah, mengapa seperti itu? Karena yang disebut dengan manajemen talenta nasional riset dan inovasi itu adalah pembentukan talenta unggul berbasis aktivitas riset. Jadi, bukan berbasis pada edukasi formal karena kita mengikuti *best practice*..(suara tidak jelas)..*global* bahwa talenta-talenta unggul itu tumbuh, termasuk *entrepreneurship* berbasis teknologi itu tumbuh dari proses dan aktivitas riset yang memang mereka mengejar *ultimate invention* dari aktivitas riset itu sendiri.

Nah, kemudian memang ada kendala cukup apa, ada kendala teknis di pada saat proses integrasi ini seperti yang Bapak, Ibu apa dengarkan mungkin, beberapa keluhan dan itu perlu saya sampaikan di sini bahwa itu terjadi karena kita mengubah proses bisnis internal. Proses bisnis internal macam apa yang kita ubah? Jadi sebenarnya selama ini fenomena di ecer-ecer itu terjadi di internal juga. Jadi, setiap unit kerja, setiap pusat riset, setiap balai itu semuanya punya sendiri, seolah-olah punya sendiri. Itulah yang sebenarnya membuat kita menjadi sulit bekerja bahkan secara internal dan itulah yang kemudian kita buka, membukanya bagaimana? Seluruh infrastruktur itu kita kelola terpusat, seluruh infrastruktur dikelola terpusat karena infrastruktur itu bagian yang paling mahal dari aktivitas riset, tidak hanya waktu beli tetapi termasuk juga pada saat melakukan pemeliharaan dan juga operasional. Jadi, itu membutuhkan biaya yang tinggi dan juga membutuhkan personil-personil yang mumpuni dan itu semua tentu tidak murah. Sehingga kalau itu dilakukan

sendiri-sendiri tentu saja itu tidak bisa, kita sudah tidak bisa kemana-mana karena uangnya akan habis karena tersebar di semuanya. Tetapi begitu infrastruktur dijadikan satu, khususnya infrastruktur yang terkait dijadikan satu dan kita sudah membuat mekanisme bagaimana orang bisa memakai itu secara bergantian mengikuti prosedur yang berlaku. Maka kita bisa melakukan banyak efisiensi, tapi di lain sisi perisetnya menjadi tidak dibebani.

Kalau dulu kami periset itu harus mengelola infrastruktur kami, kalau rusak kami harus cari uang sendiri, mengambil dari anggaran riset atau apa pun yang kami terima, DIPA riset yang kami terima untuk memperbaiki misalnya. Itu yang membuat selama ini kita sulit bergerak, sebagai contoh saya sampaikan kalau untuk kasus apa, ini saya dari Karina sendiri, dari yang di *Oxford* untuk *AstraZeneca*. *AstraZeneca Oxford* itu bukan punya semuanya sendiri, tidak, mereka itu memakai uji produksi terbatas itu seingat saya di negara lain, bahkan di Eropa, saya lupa di mana, kalau nggak salah di Spanyol, kalau saya tidak salah ya, mohon maaf. Tapi yang saya ingat untuk *animal* BSL 3 yang Macaca dia pakai yang di Itali misalnya. Bahkan mereka pun memakai berbagai negara gitu ya dan ini yang akan kita ciptakan di Indonesia. Kita tidak mungkin menyiapkan semua infrastruktur itu untuk semua pusat riset, tidak mungkin, semua kampus tidak mungkin dan itu pasti utilitasnya pun akan rendah karena mereka mungkin hanya akan memakai 1 tahun, hanya 15 hari atau 20 hari gitu.

Itulah sebabnya mengapa infrastruktur itu kita harus kelola terpusat dan kemudian bisa dipakai oleh semua pihak, tidak hanya periset BRIN karena kalau hanya periset BRIN pun itu pasti tidak mampu mengutilisasi secara penuh sepanjang tahun. Jadi, kita harus berbagi juga dengan teman-teman di industri, misalnya itu untuk *animal* BSL3 itu pasti kita akan buka juga untuk teman-teman di industri farmasi, di kampus dan sebagainya. Jadi, ini akan memastikan utilisasi infrastruktur riset kita tinggi, tetapi pembiayaan itu bisa dijamin sehingga para periset tidak perlu dibebani dengan hal-hal seperti itu dan mereka bisa dijamin bahwa alat tersebut ada dan berfungsi.

Jadi, hal seperti itu yang perlu saya sampaikan sebagai informasi, tetapi memang pada saat awal itu dilakukan saya paham sekali. Saya bisa memahami bahwa periset itu merasa zona nyamannya terganggu. Sejujurnya, dan mereka merasa oh seperti saya diambil sesuatunya gitu. Ya, karena saya juga periset, bisa merasakan itu. Tetapi dan itu sebenarnya yang terjadi juga di LIPI pada saat saya melakukan itu 2018 dengan *cut off* di 1 Januari 2019. Makanya juga ada ribut 2019, tetapi setelah itu dijalankan ternyata semua periset kan lebih senang seperti itu karena mereka tahu, oh ternyata apa peralatan riset bisa dijamin saya bisa pakai, saya tidak perlu dibebani, saya bisa pakai selama saya perlu. Meskipun, kalau perlu harus antri memang gitu ya. Jadi, ada yang memakai mungkin 4 bulan setelah itu selesai baru bisa dipakai yang lain dan seterusnya, karena tidak semua alat bisa dipakai berbarengan. Misalnya seperti yang disampaikan Prof. Amin sebagai contoh untuk apa fasilitas *animal* BSL3 misalnya tentu tidak bisa berbarengan, harus bergantian itu mengikuti prosedur yang berlaku dan didampingi oleh *bio safety officer* dan sebagainya. Tentu itu juga tetap harus diikuti dan memang harus bergantian. Tetapi, kita menjamin bahwa infrastruktur riset itu tersedia dan

berfungsi. Itu yang nomor satu. Ya, karena selama ini kita banyak mengalami infrastruktur riset itu sudah beli bahkan banyak yang tidak terpakai sampai rusak misalnya, karena memang tidak sanggup memakai sepanjang tahun, misalnya gitu.

Jadi, itu sebenarnya asal-muasal mengapa banyak yang merasa jadi seperti kurang apa wah ini, ya memang itu saya tahu bahwa itu akan menjadi suatu kejutan bagi para periset begitu. Tetapi, ya kalau kita tidak melakukan dari sekarang tentu kita akan terus berkuat dengan problem yang sama karena anggaran tidak akan pernah bisa mencukupi, itu saya pastikan. Jadi, kalau kita harus membiayai semuanya seperti semua punya sendiri itu tentu tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi, itu yang secara umum yang bisa saya sampaikan.

Ya, kemudian yang perlu saya sampaikan terkait Eijkman. Jadi, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa Eijkman itu tidak dibubarkan justru Eijkman itu dilembagakan. Jadi, itu yang nomor satu yang perlu saya sampaikan. Dilembagakan menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, dulu memang namanya Lembaga Biologi Eijkman, tetapi itu bukan LPMK, bukan apa-apa dan mereka tetap entitas pemerintah karena berada di bawah Kemristek. Jadi, sebenarnya tidak ada yang berubah secara birokrasi, tidak ada yang berubah. Mereka juga tidak bisa seenaknya sendiri, tidak bisa, karena mereka itu tetap entitas bagian dari waktu itu Dirjen Risbang di Kemristek. Jadi, seperti itu. Sehingga, apa dan untuk aktivitas vaksin Merah Putih di Eijkman itu saya pastikan masih terus berjalan karena periset utamanya boleh saya sebut namanya Doktor Tejo dan Dokter Yosephine itu masih ada di situ dan kami justru apa menanyakan kurang siapa lagi karena toh kita di Cibinong kita juga punya apa orang-orang yang bisa melakukan uji netralisasi virus dan sebagainya. Kalau masih kurang kita tambah begitu ya, baik yang dari teman-teman di Cibinong maupun sumber daya manusia yang lain.

Kemudian integrasi unit riset kementerian lembaga yang sedemikian besar itu apakah akan malah membebani dan menjadikan rentang kendali kita menjadi terlalu besar gitu. Ini syukur *Alhamdulillah* ini adalah entitas riset, entitas riset memang berbeda dengan entitas administratif. Dan yang kedua, BRIN sebagai lembaga pemerintah itu strukturnya berbeda sama sekali dengan lembaga pemerintah umumnya. Jadi, BRIN itu kami tidak apa, struktur kami itu sangat tipis dan kita sebagian besar itu adalah nonstruktural. Jadi, organisasi dan pusat riset itu nonstruktural, jadi bukan pejabat eselon. Jadi, mereka nonstruktural, mereka tetap profesor, mereka tetap seperti itu. Jadi, mereka relasinya itu sangat cair dan sangat tipis gitu. Jadi, basisnya itu adalah memang kebakaran dari mereka masing-masing, sedangkan yang struktur kami itu sebenarnya cukup kecil. Jadi, yang ada di sestama dan para deputi itu saja. Sehingga secara organisasi meskipun jumlahnya kelihatannya besar, itu mengapa kami bisa ditargetkan dan bisa menyampaikan 31 Januari kami jelas pasti tutup buku proses integrasi. Jadi, kami sejak 1 September sampai 31 Januari, jadi 5 bulan kami selesaikan proses integrasi dan *Insha* Allah itu sudah selesai. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan integrasi.

Kemudian saya pastikan itu *Insha* Allah tidak ada apa teman-teman itu tidak akan dirugikan karena basisnya fungsional. Jadi, justru sebagian itu malah naik karena tunjangan kinerja di BRIN itu sudah lumayan bagus karena 80% tunjangan kinerjanya. Yang kedua, karena basis mereka itu fungsional, justru dengan di BRIN mereka bisa naik ke atas. Jadi, contohnya teman-teman di Kemdikbud selama ini, itu tidak bisa menjadi peneliti ahli utama karena tidak ada formasinya kalau di Kemdikbud. Tapi begitu di BRIN mereka bisa langsung karena formasi perisetnya ya sebanyak jumlah orang BRIN begitu ya. Jadi, itu jauh lebih terbuka, sehingga mereka bisa langsung kami proses untuk apa, meskipun mereka dulu sebenarnya sudah bisa menduduki ahli utama tapi tidak bisa masuk karena tidak ada formasinya gitu. Hal-hal yang seperti itu yang justru apa sangat menguntungkan dan perlu saya sampaikan ini memang ada dua kasus yang berbeda untuk pengalihan SDM periset dari unit riset K/L yang lain yaitu justru sebagian besar periset itu sekarang apa komplain karena mereka ingin dipindah ke BRIN. Tapi tidak semua kementerian lembaga itu menyetujui itu, jadi ada beberapa kasus kementerian lembaga yang memang tidak mengizinkan perisetnya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Izin, izin, Pak.

Datanya ada Pak itu, K/L mana yang minta pindah di BRIN. *Sorry, sorry* Pak, maaf ya, maaf ya. Saya butuh data itu supaya saya bantu *panjenengan* nanti komunikasi ke publik.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Jadi, di paparan tadi ada tuliskan, itu contohnya Kemenperin. Kemenperin hanya menyerahkan 22% periset yang sudah berusia di atas 55 tahun. Artinya karena memang di atas 55 tahun mereka tidak bisa alih jabatan, sedangkan yang lain tidak diperkenankan pindah meskipun mereka sudah menulis surat ke kami.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Jadi, sebenarnya peneliti-peneliti di Kemenperin ini aslinya ingin pindah ke BRIN, tapi tidak dikasih oleh menterinya begitu ya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, mohon maaf ini untuk Pak Agus ya. Saya sudah sampaikan juga langsung ke Pak Menteri. Jadi, mohon itu bisa di.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Mana lagi selain Kemenperin.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

BMKG. BMKG, Bapak yang saya sudah terima suratnya Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Ada suratnya ya, bisa dong tembusin ke kita ya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Ya, surat dari perisetnya ada, tapi dari apa ini instansinya itu tidak mengizinkan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Ya, paham, paham.

Baik, terima kasih Pak Ketua.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kalau ESDM sudah disampaikan kepada kami pengalihannya, tetapi sekarang masih masalah dengan aset, Bapak. Jadi, asetnya belum tercapai kesepakatan. Jadi, karena untuk kementerian yang sifatnya sangat teknis kami membutuhkan aset. Untuk 28 kementerian yang tidak *hard science* itu malah kami sediakan kantor. Jadi, kami terima orang saja, kami terima orang saja kami sediakan kantor, itu hampir 1.847 seingat saya dari 28 K/L, tapi yang 6 kementerian itu memang saya minta, itu harus ada asset karena kalau tidak saya tidak bisa memfasilitasi periset ini. Misalnya Kemkes, ESDM, mereka sudah, Kemkes sudah, terus Kemtan, ESDM, LHK, tapi LHK dan Kemkes itu sudah sudah selesai berproses minggu lalu. Kami sudah menyepakati aset-aset yang dialihkan ke BRIN misalnya sebab kalau aset tentu tentu terus mereka nanti disuruh apa. Jadi, nanti kami akan kesulitan karena mereka tidak ada lab-nya kan tentu tidak bisa melakukan apa-apa nanti gitu. Tapi, kalau yang memang tidak perlu lab kami terima orang saja tidak masalah begitu dan sudah selesai semuanya, kurang lebih seperti itu Bapak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Iya.

Jadi, untuk jelasnya bisa minta datanya Pak, dari kementerian lembaga mana yang sudah menyetujui untuk pindah dan akan pindah per 31 Januari, lembaga mana saja, kementerian dan lembaga instansi yang belum menyetujui, kendalanya apa gitu Pak. Kendalanya tadi Bapak bilang aset, ada kendalanya mungkin ada permasalahan administratif atau apa kendala dari lembaga yang akan melepaskannya, itu kira-kira permasalahannya di mana.

KETUA RAPAT:

Saya mau tanya juga, interaktif ini Pak.

Mohon maaf kepada para anggota, nanti anggarannya dari mana Pak untuk ini, untuk para periset yang akan masuk nanti menjadi, yang akan bernaung di bawah BRIN.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Jadi, perlu saya sampaikan sampai saat ini kami belum menerima anggaran tambahan apa pun. Jadi, untuk gaji pun kami masih mengambil dari anggaran eks 5 entitas itu. Jadi, karena itu akan diproses oleh DJA di Kementerian Keuangan yang waktu itu saya sampaikan tambahan 4,4T itu Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Termasuk yang mereka-mereka yang akan berpindah dari kementerian lembaga ke dalam BRIN.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, betul.

Jadi sebagian sudah berpindah Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tapi sudah berpindah secara fisik dan secara administratif.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Sudah, secara fisik sudah.

KETUA RAPAT:

Tetapi anggarannya itu sendiri masih belum disetujui.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Belum.

Jadi, kami mulai Februari kami harus mulai membayar gaji mereka itu kami ambil dari, kami talangin dulu dari anggaran yang ada saat ini yang 6,1T itu.

KETUA RAPAT:

Tapi, itu kan bukan merupakan bagian dari, bukan, maksudnya dari aspek anggaran Pak. Itu kan bukan anggaran untuk gaji sesungguhnya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, kami memakai bagian anggaran gaji kami dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi, artinya sebagian dari Bapak-bapak, Ibu-ibu nggak terima gaji kalau gitu demi teman-teman lain.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Bulan-bulan berikutnya Bapak, yang kami pakai.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin, Pimpinan.

Saya mau ceritakan waktu kita membuat Undang-Undang Sisnas Iptek kita panggillah waktu itu Menpan Pak Asman Abnur. Idenya ada duit 24 triliun di semua lembaga litbang, kementerian khususnya litbang kementerian yang itu mau dikoordinasikan. Sekarang ini yang tadi dipertanyakan ke Pak Handoko ini sibuk hanya menggabungkan kelembagaan, tapi *grand design* dari riset yang mau dicapai itu nggak jelas. Inilah makanya terjadi gejolak ini iya kan dan kedua pertanyaan Pak Eddie tadi kalau hanya menggabungkan semua peneliti perekayasa, kemudian nggak ada duitnya, hanya ngambil dari 6 triliun itu gimana? ya pantesan, saya mohon maaf Pak Handoko saya belum pernah mendengar satu pun dari kelembagaan yang *happy* mau pindah ke BRIN.

Saya contohkan teman dari Bappenas, saya ketemu di acara pernikahan resepsi salah satu teman Polri, 2 hari yang lalu, kami nangis semua Bu Litbang di Bappenas. Setiap ketemu peneliti perekayasa belum pernah Pak di telinga saya mendengar dia *happy*, makanya kami minta data. Ini di *youtube* ya didengar di mana-mana, sehingga ini tidak boleh ada kebohongan. Kalau Bapak menggunakan 6 triliun untuk membayar semua yang bergabung, lah ini kemunduran iptek, kemunduran, sangat mundur sekali.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Itu yang saat ini masih berproses dengan DJA, Ibu, masih berproses dengan DJA. Itu yang kami dengan Bu Menteri Keuangan sudah kami minta untuk ada percepatan.

INTERUPSI F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Interupsi Pimpinan, sedikit Pimpinan.

Pak, Bapak ngambilin peneliti-peneliti kalau dia nggak bisa berkembang untuk apa, kalau anggarannya nggak ada buat apa? Bapak ngabisin uang negara. Itu kita taruh jadi itu di tempat Bapak itu, setiap masa tahun anggaran kita minta BRIN ini menciptakan suatu produksi teknologi, kalau nggak percuma Pak, nanti tahun berikutnya kita potong aja, kasih untuk bayar gaji aja karena nggak ada hasilnya nanti. Kita nggak akan setujuin Pak, kalau Bapak begini polanya, kita yang pusing gitu. Jadi, kementerian kita jadi satu ini supaya menghasilkan suatu teknologi yang *clear* untuk negara kita apa.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Mohon izin, Bapak Pimpinan.

Jadi, ini masih berproses Bapak. Jadi, karena memang sejak tahun lalu, jadi Ibu Menteri Keuangan dan DJA Pak Isa itu menyampaikan jadi sesuai hasil APBN apa, Undang-undang APBN proses pengalihan itu bisa dilakukan setelah masuk tahun anggaran.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin.

Eggak tadi Bapak bilang setelah nanti bulan satu Bapak udah aktif membayarkan gaji mereka.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, karena kita sudah melakukan proses pemindahan. Itu sebabnya kami meminta ke DJA untuk mempercepat proses pengalihan anggaran ini.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, terus program yang dibangun apa nanti, ini kan dari unit-unit kementerian, terus apa program mereka kalau Bapak tarik ke situ.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Ya itu, begini Bapak, jadi apa ya, jadi perlu saya sampaikan kronologinya. Jadi, di awal Bapak Presiden itu memang mengamanatkan di 27 April, di Ratas 27 April bahwa basis yang dipakai itu adalah anggaran riset tahun 2018 sebesar Rp26 triliun, itu basis yang dipakai pada saat itu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Dananya di mana Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Itu yang ada di semuanya, semua.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Tahun berapa?.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Yang dipakai itu anggaran tahun 2018 yang dipakai sebagai basis Bapak Presiden. Gitu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya tapi uangnya sekarang Bapak mau ambil dari mana, di mana uang yang 26 triliun itu?

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Ya, itu yang sedang berproses dengan DJA karena mereka sudah di bintang semua Pak, yang 4,4 triliun kan sudah dibintang sejak Undang-Undang APBN itu dari awal sudah dibintang. Jadi, sekarang kami sedang menunggu 4,4 triliun dan isi programnya itu apa, itu kami juga sedang menunggu karena itu ada di banyak tadi banyak K/L gitu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Jadi, kalau saya rasa bagus pansus saja ya Pak karena nanti anggaran ini hilang entah ke mana. Ini peneliti-peneliti ini bilang nggak jadi, nggak jadi, mabok kita. Menurut saya butuh pansus ini Pak, nggak *clear* ini anggarannya. Nanti karena peneliti ini otaknya di atas kita, pusing juga nanti, iya kalau kita 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau ini nanti kacau kita ini, uangnya nggak *clear* ini, mungkin pansus saja Pak biar *clear*, biar tahu kita penggunaan anggarannya gimana gitu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Pak. Jadi, mungkin ini Pak, karena begini pada prinsipnya ketika kita menyetujui anggaran untuk BRIN di tahun, untuk Tahun Anggaran 2022 itu tidak ada mata anggaran untuk pembayaran gaji, gaji tambahan akibat pengintegrasian itu. Saya khawatir justru jadi temuan nanti Pak, itu yang kami khawatirkan.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kalau alokasi gaji belanja pegawai itu ada akun khusus Pak yang memang tidak akan mengambil bagian dari program, itu saya pastikan itu. Jadi, kan sudah ada akun khusus yang untuk gaji kami, yang 5 entitas itu sampai Desember ya Pak ya. Jadi, itu yang sebenarnya kami pakai dulu. Jadi, kami tidak akan memakai anggaran program karena tidak bisa juga gitu.

KETUA RAPAT:

Saya, kami faham Pak bahwa memang tidak akan digunakan. Kalau digunakan anggaran program, kita yang mungkin akan bersuara terlebih dahulu Pak. Tetapi dari anggaran gaji yang sudah kita sepakati, itu kan tidak ada mata anggaran untuk 1.800.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Untuk tambahan.

KETUA RAPAT:

Tambahan itu nggak ada Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Ya, itu yang sekarang kami meminta supaya bintang itu bisa segera diblokir, yang ada yang 4,4T itu yang ada di berbagai K/L tersebut, percepatan supaya bisa segera masuk ke BRIN.

KETUA RAPAT:

Kalau bisa masuk sebelum waktu pembayaran tanggal pembayaran gaji Pak, andaikata ternyata belum masuk dan belum disetujui berarti Bapak terpaksa harus, satu menunda pembayaran gaji kepada beliau-beliau yang berhak menerima gaji atau nggak Bapak akan pergunakan mata anggaran yang memang tidak ada persetujuan sebelumnya Pak. Itu saya kira mungkin harus kita jadikan perhatian Ibu/Bapak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, itu jadi temuan Pimpinan.

Jadi, saya nggak ngerti polanya beliau ini seperti apa. Tapi, menurut saya dia nggak bisa menggunakan kesepakatan yang sudah kita setuju di 2021. Kalau merubah beliau ini harus mengajukan lagi ke Komisi VII untuk perubahan anggarannya, Pimpinan. Jadi, nggak bisa serta-merta beliau ini mengutak-ngatik anggaran yang sudah setuju Komisi VII. Mungkin itu, makanya iya kan jadi nggak bisa Pimpinan. Jadi, Bapak tidak bisa serta-merta Pak, karena itu sudah menjadi undang-undang juga bagi kita. Kalau Bapak mau

melakukan perubahan itu minta persetujuan lagi ke Komisi VII, apakah disetujui atau tidak, itu silakan aja, tapi kalau nggak berarti cacat hukum.

Izin, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, saya kira itu betul analisa kita semua dan saya kira ini untuk kebaikan BRIN juga Pak, jangan sampai ada temuan di kemudian hari.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kami justru ingin mendapatkan dorongan dari Bapak, Ibu Komisi VII agar proses itu secepatnya bisa terjadi.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Bapak ngajuin nggak pernah ke kita, macam mana mendorongnya Pak, saya tanya. Bapak baru hari ini ngomong ke kita karena kita tanya, gimana kita mendorongnya, pake apa mendorongnya, bukan pengajuan dari Bapak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Bukan, sejak awal waktu pembahasan di Komisi VII, kan kami sudah menyampaikan hasil dari.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Pak, izin Pimpinan.

Bapak seharusnya di paparan tadi ini menjelaskan regulasi itu bahwa ada penambahan anggaran karena kami menampung tenaga penelitian untuk melakukan penelitian tambahan di BRIN mungkin gitu, tapi Bapak nggak ada mengusulkan dari tadi, gimana kita menyetujuinya. Ini bukan uang Bapak pribadi.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Bukan Bapak, maksud saya di pembahasan pada saat tahun lalu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Loh iya tapi nggak ada usulan anggarannya, Bapak boleh cek saja, rekamannya ada juga, berapa nilai yang Bapak ajukan untuk perubahan kan nggak ada, kan nggak ada gitu loh, terus Bapak mau ubah di mana gitu loh, kita bisa buka rekamannya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Di situ ada tertulis yang 10,5 itu Bapak, 6,1 tambah 4,4 itu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Oh iya, 4,4 kan anggarannya nggak ada Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Pada saat itu belum ada, betul.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, anggaran mana yang mau digunakan, yang 6,1 ini kan di dalam LPMK sekarang ditarik ke Bapak. Nah, LPMK ini sudah mempunyai program loh. Jadi, kalau Bapak rubah pun LPMK pun pasti ribut ini. Walaupun LPMK-nya bahasa lainnya entah dilebur, tapi pengajuan 2021 itu mereka ke kita. Kalau Bapak rubah Bapak harus ajukan juga itu program baru ke kita.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kami tidak melakukan perubahan yang 6,1 Bapak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ya makanya kalau Bapak nggak rubah berarti kita masih mengacu pada program LPMK yang lain kan.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Persis, kalau programnya persis, betul.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Anggarannya persis ke situ kan.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Tapi kami dengan ada beberapa program yang Bapak *drop*.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Tidak ada Bapak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ada, Bapak jelaskan aja jadi kita *clear*, ada beberapa tadi yang di LAPAN atau BATAN itu, saya nggak tahu tapi ada beberapa program yang Bapak rubah menurut kami. Itu yang tadi kami diskusi di ruang makan, itu yang kami terima laporannya. Coba Bapak ajukan saja, sekarang kan udah jadi, udah tanggung jawab Bapak ini. Coba ajukan ulang ke kami, mungkin kita buat rapat lagi, Pimpinan. Apakah nanti kita setujuin, jadi judulnya nanti mungkin meminta usulan baru dari BRIN saja untuk minta persetujuan Komisi VII, coba Bapak buat saja Pak. Kalau nggak Bapak rubah berarti anggaran itu masih tetap itu.

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya Pak, saya itu cukup *clear* dalam artian begini Pak andaikata anggaran yang diajukan kepada Kementerian Keuangan itu tidak cair pada saat nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, itu Bapak tidak bisa menggunakan mata anggaran yang sudah ada yang kita sudah sepakati karena itu sudah dialokasikan untuk mata-mata anggaran yang telah kita setuju bersama-sama ya sesuai penggunaannya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kalau tidak, mungkin kami akan minta K/L-K/L sebelumnya untuk tetap membayarkan terlebih dahulu seperti itu yang paling ini Bapak.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan, berarti harus skenario disiapkan Pak karena makanya tadi Pak Karding nanya mana saja lembaga yang sudah gabung, karena itu kan ada jumlah pegawai, peneliti istilahnya Pak, periset ya. Nah, tentunya ini harus ada hitungannya karena kan waktu membuat anggaran 2021 itu dengan eksisting perisetnya seperti ini. Nah, ketika selama tahun ini ada penambahan atau penggabungan itu nggak bisa Bapak bayar gajinya dari uang yang sudah diketok kemarin itu 2021 untuk 2022, nggak bisa Pak, itu pelanggaran.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, tapi kami masih bisa minta mereka untuk membayarkan Bu, karena yang Januari ini pun masih mereka membayarkan karena kami sudah ada komitmen juga dengan K/L sebelumnya sampai ini diselesaikan.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Pimpinan, Sartono.

Pak BRIN, Pak Handoko. Nah, kami mengingatkan agar hati-hati gitu nanti pasti Bapak kepingin ingin untuk menyelesaikan permasalahan itu tentang tanggung jawab. Tapi, nanti ada temuan ini ya toh Bapak menjadi berat itu. Jadi, jangan sampailah itu terjadi karena kadang-kadang apa untuk apa itu kebutuhan untuk orang banyak tetapi nanti biasanya tanggung jawab ini Bapak sendiri gitu yang bertanggung jawab gitu. Ini bermasalah itu sering kejadian kan contoh-contoh. Maksudnya untuk bagaimana, kalau dulu kan ada talanganlah kurang lebih seperti itu ya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kalau saat ini, mohon maaf Pak Sartono selama DPP-nya belum dipindah ke kami, itu otomatis pembayarannya masih dari sana. Jadi, sebenarnya tidak *problem* selama DPP-nya tidak kami pindah ya oleh mereka.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Pak izin interaktif soal gaji tadi ini.

Jadi, opsi yang diambil tadi kan misalnya minta dulu kepada K/L itu bayarin, itu yang bulan apa? Februari.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Dari Januari sudah begitu, Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Oke, Januari anggappah masih *oke* karena belum semuanya terintegrasi. Kan per 31 Januari integrasi *full* udah tutup kan, kalau menurut penjelasan Bapak tadi.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Mohon maaf yang dari 1 Januari sudah dapat yang *full*, yang 28 K/L sudah dari.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Kan masih ada yang sisa.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Itu tinggal 6 ya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Oke, apakah yang *full* ini sudah nggak ada masalah dari sisi gaji yang di luar..*(suara tidak jelas)*..

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Masih dibayarkan dari K/L sebelumnya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Untuk Februari.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya, dari Januari karena belum kami pindah DPP-nya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Yang belum pindah sampai anu masih dibayar K/L.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Tapi yang sudah pindah siapa yang bayar.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Maksud saya yang belum pindah itu belum pindah DPP-nya Pak, orangnya sudah pindah tapi daftar gajinya masih di sana.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Memang boleh itu ya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Boleh.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Oleh siapa bolehnya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Iya karena memang seperti itu Pak, kalau DPP-nya belum dipindah ya mereka berkewajiban karena PNS. Ini kan PNS, pegawai negeri K/L kan jadi dia di mana pun itu ya harus dibayar gitu.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Iya.

Problem-nya kan begini ini kan soal birokrasi anggaran kita juga. Jadi, setahu saya kalau dia itu sudah pindah, ini dinyatakan pindah hari ini per 31 lah taro lah gitu ya, atau pertengahan ini sudah beberapa kalau menurut data itu. Itu untuk Februari sama sekali tidak boleh sama sekali K/L membayar dia dengan alasan apa pun, karena apa? Karena itu urusannya BRIN yang harus bayar kan udah pindah. Itu kalau sepemahaman saya. Nah, bahwa ada masalah di internal dengan DJA itu urusannya BRIN, tapi ini harus dibayarkan gimana caranya. Nah *problem*-nya ini kami nggak bisa, nanti jadi temuan loh Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Eggak kalau, mohon maaf kalau itu tidak masalah Pak, *Insha* Allah tidak ada masalah karena memang apa, kita banyak yang sampai berbulan-bulan gajinya masih dipinjamkan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Itu nggak boleh Pak, gaji orang itu nggak boleh nggak dibayarkan itu hak Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Betul, betul.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Itu hak dasar, hak dasar itu pelanggaran kalau kita nggak bayar.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Bukan, bukan, maksud saya tetap dibayarkan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Yang berbulan-bulan tadi itu apa.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Bukan, misalnya ada yang kami tugaskan menjadi di mana, pindah, tapi daftar gaji belum dipindah itu nggak masalah, tidak masalah. Makanya dia tetap dibayar oleh negara melalui salah satu K/L itu, itu yang tidak boleh itu kalau *double*.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Poinnya jangan sampai ada peneliti karena perpindahan ini terlambat mendapatkan gaji apalagi tidak mendapatkan gaji, itu poin dasarnya.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Setuju Bapak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Apa pun masalah birokrasi melingkupinya.

Yang kedua, poinnya jangan sampai hal-hal teknis administrasi pembayaran Bapak-bapak kena masalah hukum. Itu aja, ini karena kita mitra jadi kita saling mengingatkan Pak.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Terima kasih Pak, setuju Bapak.

KETUA RAPAT:

Ya, saya kira poinnya begitu Pak, kita sudah jelas semua. Jika memang nanti gaji dari para peneliti yang berpindah ke BRIN dari kementerian lembaga itu masih dibayarkan gajinya oleh KL sebelumnya nggak apa-apa Pak. Tetapi kalau itu keluar nanti dari anggarannya BRIN, saya kira itu akan jadi permasalahan baru gitu Pak.

Oke, baik kita sudah anu, kita sudah, ini silakan Pak kalau memang masih ada yang mau ditambahkan lagi, setelah itu kita lanjut ke Dirut Bio Farma.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Saya kira sudah.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Terima kasih Pimpinan.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas semua masukan, saran, dukungan dari Anggota Komisi VII karena memang soal komitmen terhadap vaksin Merah Putih kita pada posisi yang sama Bapak, Ibu, karena kami juga

pingin vaksin Merah Putih ini bisa kita kembangkan ya bersama-sama dengan lembaga riset.

Nah, dalam konteks ini memang dari awal sudah ada pembagian tugas dalam pengembangan vaksin Merah Putih, Eijkman itu adalah dalam menyiapkan *seed* vaksin. Kami nanti yang akan melakukan hilirisasi, hilirisasi itu artinya mulai dari *drug suction* pembikinan balapnya itu sampai nanti ke pembikinan produksi akhirnya, vaksin yang siap disuntikkan.

Eijkman ini tanggung jawab mereka adalah dari *seed* vaksin sampai ke preklinis, nanti setelah preklinis selesai, dianggap berhasil itu baru pindah ke Biofarma. Kita akan melakukan proses berikutnya, mulai dari pembikinan *drug suction*-nya, pembikinan produk untuk uji klinis dan seterusnya. Ini tentunya ini butuh proses.

Kami dengan Eijkman bekerja sedemikian erat karena dalam perjalanannya memang untuk membikin satu *seed* vaksin itu nggak gampang. *Seed* pertama yang kami terima dari Eijkman setelah kita tes itu tidak memenuhi kualitas industri, sehingga tidak mungkin kita lanjutkan ke proses berikutnya. Sehingga kami melakukan optimalisasi bersama dengan Eijkman dan kita gunakan lab RnD yang ada di Bio Farma. Waktu kunjungan Anggota Komisi VII ke Bio Farma itu bisa kita lihat, lab kita mana aja yang digunakan oleh Eijkman dan kita memang tugas kita bersama-sama untuk melakukan optimalisasi itu. Nah, kenapa kami juga melakukan kerja sama dengan *Baylor* karena memang pengalaman kita selama ini, kalau vaksin itu memang untuk tingkat risikonya itu tinggi. Sehingga kita harus punya opsi, jangan sampai nanti kita menggantungkan satu produk tapi itu nggak selesai, pasti juga orang akan bertanya, kok Bio Farma nggak memiliki opsi untuk itu.

Nah, ada positifnya pada saat kita melakukan kerja sama dengan *Baylor*. Pada saat kami melakukan optimalisasi ketiga terhadap *seed* vaksin Eijkman kita menggunakan, mencontoh *seed* vaksin yang kita dapat dari *Baylor*. Jadi, memang kita belajar juga bagaimana untuk menghasilkan *seed* vaksin ini yang berkualitas, memenuhi syarat industri. Itu juga kita belajar dari *Baylor*. Jadi, memang ada sinergi sebenarnya di situ. Tapi Bapak/Ibu, komitmen kami untuk bisa menghasilkan vaksin Merah Putih ini sangat tinggi dan itu juga prioritas kita. Kita akan jalankan semuanya.

Kemudian perbedaan antara vaksin Merah Putih dan yang lain. Memang vaksin Merah Putih ini itu murni *strain* virusnya murni dari orang Indonesia. Jadi, semuanya Pak, mulai dari *seed* vaksinya dari *strain* virus orang Indonesia sampai ke yang terakhir. Hanya itulah yang membedakan dengan vaksin BUMN, di mana vaksin BUMN *seed* vaksin itu kita dapatkan dari *Baylor*. Tapi, kita sudah pastikan bahwa *seed* vaksinnya itu 100% identik dengan *strain* virus yang ada di Indonesia. Memang itu persyaratan kita dulu.

Kemudian bagaimana dengan yang tadi ada pertanyaan list WHO masuk apa nggak? Memang kita masukkan WHO itu ada persyaratannya Bu. Kalau *seed* vaksinnya sudah ada dan sudah dilakukan preklinis aslinya itu baru bisa masuk, karena yang Eijkman ini belum selesai di sana kita belum

masukkan, tapi nanti setelah selesai kita akan masukkan juga Bu. Ini masalah waktu aja, masalah ..(*suara tidak jelas*).. sebenarnya. Mudah-mudahan *seed* vaksin yang ketiga ini sudah kita tes dan itu sudah memenuhi kualitas industri, ini akan segera dilakukan preklinis, nanti selesai nanti juga akan kita masukkan *list*-nya ke WHO.

Kemudian juga dari sisi proses. Jadi, memang ini sebenarnya selama pandemi ini kita banyak pembelajaran ya. Biasanya bikin vaksin itu butuh waktu tahunan Pak, 7 sampai 10 tahun tapi banyak relaksasi sekarang dilakukan oleh Otoritas Badan POM setempat, yang penting semua proses itu dilaksanakan meskipun mungkin ada proses yang diperpendek. Contoh uji klinis tahap 3 itu biasanya bisa makan waktu 3 sampai 5 tahun, sekarang dalam 6 bulan bisa dengan persyaratan tertentu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi proses-proses yang kita nggak bisa lewati, sehingga tadi kami sampaikan bahwa selama proses ini bisa berjalan dengan lancar vaksin Merah Putih ini mungkin bisa kita dapatkan proses terakhirnya itu uji klinis tahap 3 ini bisa di Q4 2022 ini. Mudah-mudahan ini akan bisa berjalan lancar seperti itu.

Kemudian bagaimana dengan adanya mutasi *strain* ya. Sekarang memang yang kita bikin terbaru di *strain* Wuhan yang asli itu tapi kami sudah menyiapkan juga *seed* vaksin yang berdasarkan *strain* Delta. Ini sudah ada, tapi memang kita fokuskan dulu untuk *strain* Wuhan dulu. Kalau ini selesai nanti akan kita akan segera untuk proses berikutnya karena memang dari beberapa studi semua vaksin yang ada di dunia ini belum ada juga yang pakai *strain* Delta ataupun menggunakan *strain* Omicron. Tapi *strain* yang lama itu masih efektif walaupun mungkin turun efektivitasnya. Tapi, selesai ini yang pertama, mungkin nanti kita lanjutkan yang Delta atau mungkin nanti bisa kita bikin yang kombinasi *multistrain*, ada Wuhan, ada Delta dan ada Omicron nanti persiapannya akan seperti apa.

Untuk fasilitas produksi *no issue* Pak karena memang kita, Bio Farma itu total untuk semua jenis vaksin itu kemampuan produksi kita lebih dari 3 miliar dosis per tahun. Tapi khusus untuk vaksin Covid kami sudah siapkan *dedicated line production* itu 250 juta dosis per tahun. Artinya itu cukup besar sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan selama memang proses pemikiran vaksin ini bisa kita lakukan secepat mungkin.

Demand-nya ya sekarang *demand*-nya memang kita masih nunggu dari Kementerian Kesehatan. Kami berharap kalau seandainya Juli ada satu vaksin yang sudah jadi. Artinya mungkin dari Agustus sampai ke Desember mungkin kita nggak perlu impor lagi. Tapi, kita lihat ya perkembangannya juga karena ini ada. Jangan sampai nanti ada kejutan lagi, ada mutasi virus baru, di mana orang akan mendapatkan vaksin tentunya kami tidak seperti itu. Tapi, kami berharap nanti memang setelah Agustus sampai Desember itu memang vaksin yang ada tuh vaksin yang murni kita produksi dalam negeri.

Kemudian, peluang yang lainnya karena kapasitas kita cukup besar, kita juga lagi menjajaki bagaimana seandainya vaksin Merah Putih atau vaksin BUMN ini mungkin bisa kita gunakan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan vaksin, terutama Afrika. Kita berpengalaman vaksin polio

Indonesia yang dibikin di Bio Farma itu, itu 70% vaksin seluruh dunia itu *supply*-nya dari kita Pak dan itu memang kita ekspor melalui kerja sama dengan WHO dan Unicef ke negara Afrika. Jadi, saya pikir juga peluang bagi kita untuk membantu negara-negara yang lain dengan kapasitas produksi kita dengan catatan memang vaksin kita ini bisa sesuai dengan, *timeline*-nya bisa kita produksi nanti di mana yang untuk vaksin BUMN kita harapkan Juli sudah dapat EUA-nya dan akan segera kita produksi dan untuk Merah Putih *Insha Allah* juga Q4 2022 nanti juga bisa selesai.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati, tanggapan dari kami.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Dirut.

Intinya begini Pak, kami membaca pernyataan Ibu Menlu yang mengatakan bahwa sudah ada impor 493 juta vaksin sejak pandemi ini. Apakah itu melalui importasi melalui jalur komersial di mana kita harus membayar ataupun melalui jalur donasi bantuan gitu. Tapi 493 juta itu tidak kecil Pak. Jadi, intinya yang ingin kita tekankan di sini vaksin domestik ini harus segera berproduksi. Apakah itu dari Erlangga dengan Bio Test, apakah dari Bio Farma dengan BUMN, tetapi dalam konteks RDP hari ini yang ingin kita tegaskan, kita tekankan dalam konteks BRIN selama ini Komisi VII mengikuti proses untuk pembentukan vaksin dalam negeri melalui Lembaga Eijkman Vaksin Merah Putih. Yang mana kita justru memberikan dukungan anggaran tambahan pada saat itu. Nah, sehingga bisa berkembang supaya cepat.

Nah, sekarang kami justru mendengar ada kemunduran-kemunduran dan berharap tidak mudur lagi dari Desember 2022 ini. Jadi, ini jangan sampai juga nanti kerja keras dan anggaran yang sudah didedikasikan itu justru nanti akan tidak menghasilkan sesuatu yang riil yang justru sangat dibutuhkan. Mengenai nanti apakah itu akan diekspor atau tidak, itu masalah berikutnya. Tetapi, yang penting domestik vaksin harus segera terpenuhi Pak, mungkin itu yang kami sampaikan.

Baik.

Ibu/Bapak sekalian.

Saya kira sudah banyak pertanyaan yang diajukan, sudah banyak yang ditanggapi, mari kita mulai membaca mengulas draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan BRIN.

Berikut saya bacakan draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi VII DPRRI dengan Kepala BRINRI dan Dirut Bio Farma Persero, Senin 24 Januari 2022:

1. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRINRI selama proses pengintegrasian lembaga dan kementerian RI ke dalam BRIN agar tetap memberdayakan para peneliti dan ilmuwan yang selama ini menjadi periset, peneliti dan perekayasa serta melanjutkan riset dan hal-hal strategis lainnya yang sudah dilaksanakan, dilakukan.

Pak Kepala, setuju? Setuju teman-teman? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRINRI untuk.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan.

Sebelum ke nomor 2 kenapa kebingungan-kebingungan tadi itu karena BRIN ini belum punya *grand design* yang dikomunikasikan dengan seluruh *stakeholder*.

Izin Pimpinan, saya mencoba diketik, mencoba merumuskan mendesak BRIN untuk memiliki rancangan besar atau *grand design* pencapaian visi Iptek Indonesia yang maju sesuai dengan visi presiden, jangan karena ada beberapa rekaman, Pak Handoko dengan Presiden itu beda gitu loh ya, ya itulah kemudian dikomunikasikan *grand design* tersebut disampaikan kepada seluruh lembaga terkait. Ini kan lembaga terkait pada bingung, tiba-tiba caplok-caplok sini tapi nggak ada *grand design*-nya mau capai apa gitu loh. Itu mungkin, untuk.

KETUA RAPAT:

Bisa untuk memiliki *grand design* atau.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Memiliki *grand design* pencapai visi Iptek Indonesia yang maju sesuai dengan visi presiden dan mengkomunikasikannya dengan pemangku kepentingan lainnya, ini *stakeholder* Bahasa Indonesianya pemangku kepentingan lainnya. Itu tadi nomor 1.

KETUA RAPAT:

Nggak, nomor 1 tetap aja itu kan sudah diketok, nah ini masuk nomor 2.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Kira-kira gitu, Pimpinan.

Kalau ada yang mau perbaiki kalimatnya silakan, dan ya kemudian dikomunikasi kepada pemangku kepentingan.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak Kepala? Ya. Baik saya baca ya.

Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRINRI untuk memiliki *grand design* atau rancang besar sesuai dengan visi Presiden RI dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pemangku-pemangku kepentingan terkait, setuju ya? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRIN untuk mempercepat proses pengembangan dan produksi vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh konsorsium riset dan inovasi Covid-19 serta memenuhi target penyelesaiannya di kuartal IV di tahun 2022.

Bagaimana Pak kepala?.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Mohon maaf, Bapak Pimpinan.

Jadi, sesuai apa hasil rapat di Menko Ekonomi. Jadi, kita sudah tidak ada konsorsium riset dan inovasi Covid-19, kita semuanya ada di BRIN, Bapak. Ya.

KETUA RAPAT:

Ya. Jadi kita rubah,

Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRINRI untuk mempercepat proses pengembangan dan produksi vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh BRINRI serta memenuhi target penyelesaiannya di kuartal IV tahun 2022.

Setuju ya Pak Kepala, bagaimana Pak Kepala?.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Kalau boleh ditambahkan Bapak, memenuhi target penyelesaian di kuartal IV tahun 2022, sebentar, mana tadi ya, selama telah memenuhi standar regulasi yang berlaku begitu karena menurut saya itu sangat penting Bapak untuk memenuhi standar itu karena ini terkait dengan keselamatan dan efikasi dari vaksin Merah Putih itu sendiri.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan.

Ini tambahan kalimat terakhir menurut saya akan membuat rancu penyelesaiannya di kuartal IV, ini akan membuat rancu jadinya, kalau kalimat terakhir ditambahkan itu. Berarti belum pasti di tahun kuartal ke IV tahun 2022 itu.

KETUA RAPAT:

Saya usul begini Pak Rico kalau boleh, kata-kata itu ditaruhnya di awal. Jadi Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRIN untuk mempercepat proses pengembangan produksi vaksin Merah Putih sesuai dengan standar yang berlaku dan serta memenuhi target penyelesaiannya kuartal ke IV.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Siap, jadi tidak mengganggu kuartal ke IV-nya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya ulang lagi ya.

Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRINRI untuk mempercepat proses pengembangan produksi vaksin Merah Putih sesuai standar yang berlaku, nggak usah lagi kan dilakukan oleh BRIN, sesuai standar yang berlaku serta memenuhi target penyelesaiannya di kuartal IV tahun 2022.

Setuju, Pak?.

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi VII DPRRI mendesak Dirut PT Bio Farma Persero untuk tidak menggeser produksi vaksin Merah Putih mengingat pengembangan yang sudah dilakukan cukup lama.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Bapak Pimpinan, kami tidak pernah menggeser prioritas Pak, memang kondisi di lapangan seperti itu Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi ini kan nanya menguatkan ini aja, menguatkan posisi Bapak saja.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Kami usul kalimatnya mungkin bukan seperti itu, kalau menggeser prioritas artinya kami tidak memprioritaskan vaksin Merah Putih. Padahal apa yang kita lakukan selama ini justru karena kita membuat vaksin Merah Putih itu berkualitas kita lakukan optimalisasi terus.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Ini mungkin begini Pak, karena sebenarnya tadi di barisan sini kaget justru vaksin BUMN itu sudah terdaftar di, Bapak tadi menyampaikan sudah terdaftar di WHO. Loh justru kenapa vaksin Merah Putih, kalau vaksin BUMN itu kan bibitnya atau apa itu kan dari laboratorium di Amerika kan Pak, vaksin Merah Putih ini kan dari di Indonesia. Kalau kita belajar atau bahasa genom yang disampaikan oleh peneliti dari Lembaga Eijkman, itu beda struktur kita ini manusia ini jaringannya, ini beda orang Amerika, orang Indonesia. Makanya itu kita desak supaya Merah Putih, walaupun saya pernah ke laboratorium Bapak, Lembaga Eijkman pake ya. Tapi artinya kalau misalnya vaksin BUMN bisa udah terdaftar di WHO, kenapa ini belum? Makanya, itu kita desak supaya itu menjadi prioritas juga. Artinya ketika *share* laboratorium ini menjadi prioritas begitu, kira-kira begitu maksudnya Pak Honesti.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Iya Bu, seperti kita jelaskan tadi kita belum bisa memasukkan ke WHO karena ada persyaratannya yang belum terpenuhi. Tapi kalau seandainya terpenuhi pasti akan kita daftarkan, satu *seed*-nya kan baru ketemu ya, baru optimalisasi, memenuhi standar industri itu baru selesai, harus segera dilakukan uji preklinis. Setelah uji preklinis selesai akan segera daftarkan ke WHO ini hanya masalah *sequence* aja, Bu.

Apa yang kami lakukan selama ini justru kita selalu melakukan optimalisasi terhadap vaksin Merah Putih itu, sehingga benar-benar memenuhi kualitas industri. Kalau nggak nanti juga nggak bisa masuk ke proses berikutnya, Pak. Target 2022 kuartal IV nggak akan terpenuhi kalau kita *seed* vaksinnya nggak bagus dulu. Jadi, maksud kami, kami memang nggak pernah menggeser prioritas, tapi kami mengusulkan kalau seandainya diterima oleh Pimpinan dan Anggota.

Komisi VII DPRRI mendesak Bio Farma untuk melakukan dan memastikan agar vaksin Merah Putih bisa dapat diselesaikan pada kuartal IV 2022. Iya itu kan di BRIN-nya Pak, kalau menggeser prioritas bagi kami kesannya negatif Pak dan kita pengingnya positif Bu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Begini Pak Dirut, izin, izin Pimpinan.

Menurut kami Pak, Bapak tadi kan menyampaikan bahwa peralatan kita komplit, laboratoriumnya juga sudah digunakan oleh Eijkman sekian lama

begitu loh. Jadi, kalau sampe memang *seed* kesekiannya Eijkman itu tidak bisa memenuhi persyaratan untuk didaftarkan ke WHO berarti ada *something wrong in this process* gitu loh gitu Pak.

Oleh sebab itu, kami menyampaikan kalau memang kami masih punya pikiran negatif kepada Bio Farma untuk tidak memprioritaskan vaksin Merah Putih ini begitu loh. Tapi kalau ini Bapak sudah punya komitmen, kita juga sudah memahami posisi Bapak ya sudah, nggak apa-apa Pimpinan kita sesuaikan dengan kemauan Pak Dirut.

Terima kasih.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Komisi VII DPRRI ini meminta Bio Farma untuk memastikan, oh mendesak ya *oke*, maaf, maaf. Komisi VII DPRRI mendesak, jangan Dirut Pak, Bio Farma aja Pak, perusahaan, oh siap, siap, baik, iya ya, maaf, maaf Pak.

Komisi VII DPRRI mendesak Dirut Bio Farma untuk memastikan penyelesaian vaksin Merah Putih sesuai dengan tenggat waktu yaitu di Kuartal IV 2022, gitu aja ya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pak Direktur Biofarma namanya Honesty, *honest*.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Siap Ibu, lagunya Billy Joel, Bu.

Demikian Bapak, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Itu tenggat ya, "g" nya dua. Jadi saya baca ulang.

Komisi VII DPRRI mendesak Dirut PT Bio Farma Persero untuk memastikan penyelesaian vaksin Merah Putih sesuai dengan tenggat waktu di kuartal IV tahun 2022.

Setuju ya?.

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRINRI untuk tidak menggunakan anggaran pada pos yang tidak disetujui dalam, yang belum disetujui dalam pembahasan anggaran BRIN tahun anggaran 2022.

Setuju ya Pak Kepala ya?

(RAPAT : SETUJU)

6. Komisi VII DPRRI akan mendalami pengintegrasian lembaga dan Kementerian Riset kedalam BRINRI dengan membentuk Panja Kelembagaan dan hlirisasi iptek.

Ini dari kita persetujuannya, ya setuju ya?.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, tujuh, Komisi VII DPRRI meminta Kepala BRIN.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan.

Sebelum ke poin ke-7, Pimpinan. Tadi saya teringat kalau tidak salah senior kami, Pak Karding itu meminta data tentang kementerian lembaga dan entitas riset mana-mana saja yang sudah bersedia dan mau bergabung itu, saya kira patut dimasukkan dalam kesimpulan.

Terima kasih.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Waktunya juga kapan harus diserahkan.

KETUA RAPAT:

Ya, minggu depan aja sekalian sama data yang lain.

7. Komisi VII DPRRI meminta Kepala BRINRI menyampaikan data terkait lembaga dan kementerian yang telah mengalihkan, yang telah dan belum mengalihkan penelitiannya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Yang telah aja Pak.

KETUA RAPAT:

Yang belum kan kita harus tahu *problem*-nya di mana, Bu Andi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Oh gitu beserta ininya Pak, aset dan jumlah personilnya.

KETUA RAPAT:

Data terkait lembaga dan kementerian yang telah dan belum mengalihkan penelitiannya ke BRIN beserta aset dan kelengkapan lainnya, iya kepada Komisi VII, ya.

Oke, Pak Kepala bagaimana?

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Terus kemudian terakhir.

Komisi VII meminta Kepala BRINRI dan Dirut PT Bio Farma untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPRRI dan disampaikan kepada Komisi VII DPRRI paling lambat tanggal 1 Februari 2022, 1 minggu ya Pak, setuju ya?.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Berarti yang nomor 7 tanggal 1 juga.

KETUA RAPAT:

Semua, ini kan semua jawaban.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Nggak, nomor 7.

KETUA RAPAT:

Termasuk Ibu, ya setuju ya? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin nomor 2 ada sedikit kalimat yang tergantung ya, Komisi VII untuk memiliki *grand design* pencapaian visi Iptek Indonesia.

KETUA RAPAT:

Oke, baik kita cabut dulu kesimpulan nomor 2, nah sekarang kita tetapkan lagi.

Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRINRI untuk memiliki *grand design* pencapaian visi Iptek Indonesia atau rancangan besar sesuai dengan visi presiden, begini ya cukup ya. Oke.

Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BRINRI untuk memiliki *grand design* pencapaian visi Iptek Indonesia sesuai dengan visi Presiden RI dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan terkait.

Setuju Pak? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, terima kasih.

Demikian kesimpulan telah kami bacakan dan berikan kesempatan kepada Kepala BRIN disusul oleh Dirut PT Bio Farma untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilakan.

KEPALA BRINRI (LAKSNA TRI HANDOKO):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Saya atas nama Keluarga Besar BRIN menyampaikan terima kasih atas masukan dari Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami percaya itu akan bisa mempercepat dan memperkuat BRIN ke depan. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan kontribusi bagi bangsa, negara dan masyarakat kita.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DIRUT PT BIO FARMA (HONESTI BASYIR):

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII.

Atas nama Bio Farma kami mengatakan terima kasih atas dukungan selama ini, komitmen kami juga untuk bisa memberikan yang terbaik khususnya dalam pembuatan vaksin Merah Putih dan vaksin BUMN untuk pencegahan pandemi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BRINRI dan Direktur Bio Farma atas kerjasamanya baik dalam rapat ini.

Atas nama Pimpinan Komisi VII kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII, terutama mereka yang hadir sejak tadi pagi jam 10.00 WIB sampai dengan sekarang ini adalah pejuang-pejuang kita di Komisi VII, serta permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanallahu Wata'ala*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Kepala BRIN dan Direktur Utama Bio Farma pada hari ini saya tutup. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rapat pada hari ini kami nyatakan ditutup.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 20.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002